



POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

TAHUN 2018





SAMBUTAN BUPATI ACEH JAYA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan Rahmat dan hidayah-Nya, Pokok- pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Jaya dapat dirampungkan sebagai hasil kerja Tim Penyusun yang terdiri dari unsur Pemerintah, Tokoh Budaya, dan Pelaku Seni dan Budaya Kabupaten Aceh Jaya yang dikoordinasi langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Aceh Jaya ini tentunya menjadi langkah kongkrit dari Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah dalam usaha untuk pemajuan kebudayaan daerah dan nasional, setelah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan amanat dari pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sangat selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bahwa diantara yang menjadi pusat perhatian pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, adalah pembangunan dibidang kebudayaan, baik pada dimensi ekspresi budaya dan tradisi maupun pada dimensi nilai-nilai budaya, tradisi dan kearifan local masyarakat yang dapat memperkuat sikap dan perilaku (karakter) toleransi, kekeluargaan dan gotong royong yang mulai tergedasi di era globalisasi saat ini.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan pengkajian dan penyusunan Pokok- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Jaya, tentu sangat konstruktif untuk mendukung program- program strategis pemajuan bidang kebudayaan yang telah dicanangkan Pemerintah.

Sebagai Pemerintah, tentu sangat menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan penghargaan yang

setinggi-tingginya baik kepada Tim Penyusun PPKD maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya beserta jajarannya, sehingga Dokumen PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Jaya dan Ketua Dewan Kesenian Aceh Kabupaten Aceh Jaya (DKA) beserta dengan jajarannya. Serta kepada semua pihak yang telah memberikan kritikan dan masukan dalam kegiatan penyusunan PPKD ini.

Dengan tersusunnya Dokumen PPKD ini, tentunya Pemerintah Daerah memiliki referensi yang kuat untuk mewujudkan komitmen pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Jaya, dan semoga Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Aceh dapat lebih focus dalam melakukan program pengembangan dan pelestarian di bidang kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, sehingga mampu menjadikan kebudayaan daerah menjadi kebudayaan yang bertaraf Nasional bahkan Internasional.

Sekian dan terima kasih

***Billahitaufiq Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Aceh Jaya, Oktober 2018
BUPATI ACEH JAYA,

Drs. H. T. IRFAN TB

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH JAYA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, atas rahmat Allah Swt, Penyusunan draft Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 dapat di selesaikan bersama dengan Tim Penyusun. Pencapaian ini tentu nya menjadi suatu kebanggaan tersendiri kami bersama Tim penyusun dengan waktu yang sangat singkat dapat merampungkan laporan ini sesuai dengan limit waktu yang ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. RI. Namun demikian, kami menyadari, draft ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Draft PPKD ini sesuai yang diamanah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, sehingga kerja-kerja penyusunan terus berjalan dalam setiap tahapan pemajuaannya.

Kami sangat menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), tahap pengumpulan data melalui wawancara, kajian referensi, kajian dokumen, untuk saling menopang dalam mempercepat proses pengidentifikasian pokok-pokok pikiran kebudayaan yang tersebar luas dan kompleks di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, tim penyusun telah dapat memenuhi kebutuhan mengidentifikasi pokok-pokok pikiran kebudayaan untuk diinput kedalam system Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK) yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam penyusunan Draf PPKD.

Kami menyadari, dengan selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dari berbagai pihak. Pertama sekali kepada

Dirjen Kebudayaan yang telah mempercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya untuk menyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya yang tiada hentinya memberikan dukungan dan arahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang telah meluangkan waktu khusus untuk ikut dalam mendukung proses penyusunan PPKD dengan memberikan banyak informasi, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif. Begitu juga kepada narasumber yang memberikan informasi kepada tim penyusun dalam proses perampungan PPKD tersebut. Dan kepada semua komponen masyarakat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kepada semuanya kami ucapkan terimakasih.

Harapannya kedepan, draft ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kebudayaan yang terus bergerak. Kedepan, penyempurnaan atas draft PPKD ini sedapat mungkin merupakan hasil potret dari dinamika yang berlangsung dalam kondisi kekinian, sehingga setiap perubahan atas pokok-pokok pikiran kebudayaan yang sudah mengalami kemajuan ataupun yang mengalami kemunduran, kondisinya tetap dapat terpantau.

Buku ini sendiri adalah sebetulnya boring kebudayaan, yang didalamnya memaparkan 11 objek pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Paparan yang disajikan dalam draft PPKD ini masih bersifat identifikasi terhadap berbagai jenis pokok pikiran kebudayaan yang sudah tidak ada tetapi pernah ada dalam kehidupan.

Sebagai kajian yang masih bersifat identifikasi dengan tujuan awal untuk mengisi sistem yang telah dibuat khusus oleh tim Dirjen

Kebudayaan, maka paparan di dalamnya tentu belum ditemukan analisis yang mendalam. Untuk itu, riset ini tentunya masih perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam nantinya. Dan, tentu saran dan kontribusi positif untuk penyempurnaan draft PPKD ini senantiasa kami harapkan.

Penyempurnaan Kepada seluruh Tim Penyusun, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama, komitmen dan upaya yang maksimal dilakukan untuk merampungkan proses penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Jaya tahun 2018 ini. Semoga draft ini bermanfaat dalam pemajuan kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Jaya.

***BillahitaufiqWalhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Aceh Jaya, Oktober 2018
**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Jaya,**

ABDUL JABAR, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19660330 198803 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Bupati Aceh Jaya	i
Kata Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya	iii
Daftar Isi	iv
BAB I RANGKUMAN	1
BAB II PROFIL KABUPATEN ACEH JAYA	17
II. 1. Tentang Kabupaten Aceh Jaya	17
II. 1. 1. Batas Wilayah	19
II. 1. 2. Penduduk.....	19
II. 1. 3. Potensi.	20
II. 1. 4. Demografi.....	21
II. 1. 5. Latar Belakang Budaya	22
II. 1. 6. Keragaman Budaya	22
II. 1. 7. Sejarah Singkat Budaya	24
II. 1. 8. Sejarah Singkat Wilayah Administratif	26
II. 1. 9. Peraturan Tingkat Daerah	27
II. 1. 10. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD Tim Penyusun	28
II. 1. 11. Proses Pendataan	29
II. 1. 12. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi.....	29
II. 1. 13. Catatan Evaluasi dan Proses Penyusunan.....	29
BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN	32
III. 1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan	32
BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	33
IV. 1. Manuskrip.....	33
IV. 2. Tradisi Lisan	33
IV. 3. Adat Istiadat.....	34
IV. 4. Ritus	35
IV. 5. Pengetahuan Tradisional.....	36
IV. 6. Teknologi Tradisional	37
IV. 7. Seni.....	39
IV. 8. Bahasa.....	39
IV. 9. Permainan Rakyat.....	39

IV. 10. Olahraga Tradisional	40
IV. 11. Cagar Budaya.....	41
BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	42
V.1. Manuskrip.....	42
V.2. Tradisi Lisan.....	44
V.3. Adat Istiadat	46
V.4. Ritus.....	47
V.5. Pengetahuan Tradisional	49
V.6. Teknologi Tradisional.....	51
V.7. Seni	54
V.8. Bahasa	54
V.9. Permainan Rakyat	55
V.10. Olahraga Tradisional	56
V.11. Cagar Budaya.....	57
BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN.....	58
BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	63
VII.1. Permasalahan dan Rekomendasi	63
VII.2. Manuskrip.....	63
VII.3. Tradisi Lisan	64
VII.4. Adat Istiadat.....	65
VII.5. Ritus	66
VII.6. Pengetahuan Tradisional	67
VII.7. Teknologi Tradisional	69
VII.8. Seni.....	71
VII.9. Bahasa	74
VII.10 Permainan Rakyat	75
VII.11 Olahraga Tradisional	77
VII.12 Cagar Budaya.....	78
VII.13 Upaya.....	80
VII.14 Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten yang tergolong baru di Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 10 April 2002. Dasar dari pembentukan itu sendiri sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 dan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2002. Kabupaten Aceh Jaya memiliki keunikan mulai dari kekayaan alam, flora dan fauna, seni, budaya, pemandangan yang indah, bahkan keunikan penduduknya itu sendiri.

Sebagai contoh, sebagian penduduk di Kecamatan Jaya yang terletak sekitar 75 Km di sebelah barat daya ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh-berperawakan seperti orang eropa, berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Mereka dipercaya merupakan keturunan prajurit Portugis pada abad ke-16 yang kapalnya terdampar di pantai kerajaan Daya dan ditawan oleh Raja di kawasan itu. Para prajurit Portugis yang ditawan tersebut lama kelamaan memeluk Islam, menikah dengan penduduk setempat dan mengadaptasi tradisi Aceh secara turun temurun. Pada tahun 2004 silam, Aceh Jaya khususnya menjadi pusat perhatian dunia.

Hal ini diakibatkan terjadinya gempa bumi dan tsunami yang meluluh lantakkan semua infrastrukturnya dan juga penduduknya. Aceh Jaya merupakan daerah yang terparah terkena dampak gempa dan tsunami

Secara demografis, berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 sebanyak 45.467 Jiwa, Perempuan 42.146 Jiwa, sehingga total penduduk Aceh Jaya berjumlah 87.622 Jiwa (sumber; BPS Aceh Jaya, 2017)

Kepadatan penduduk di sembilan kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Krueng Sabee, Jaya, Setia Bakti, Panga dan Sampoiniet. Sedangkan terendah adalah Kecamatan Darul Hikmah dengan total penduduknya sejumlah 6.537 Jiwa.

Corak budaya yang dominan di Kabupaten Aceh Jaya hampir sama dengan di Aceh Lainnya, seperti Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar dan

Banda Aceh, mulai rumah adat, pakaian adat, upacara perkawinan, upacara peusijek, tarian adat, senjata adat, makanan adat, suku adat, bahasa daerah dan lagu daerah. Untuk lagu daerah Kabupaten Aceh Jaya sendiri kita belum punya. Tidak sedikit juga masyarakat Aceh yang merupakan keturunan India, Arab, Persia maupun Turki. Hal ini karena terjalannya pernikahan dari para pedagang yang masuk ke tanah Aceh dan menikah dengan penduduk setempat.

Secara historis, Kerajaan Negeri Daya didirikan pada tahun 1480 M dengan raja pertama “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” atau lebih dikenal dengan julukan “Po Teumeureuhom”, atau “Cik Po Kandang” yang membawahi empat kerajaan yang di persatukannya, yaitu:

1. Kerajaan Negeri Keuluang.
2. Kerajaan Negeri Lamno.
3. Kerajaan Negeri Kuala Unga, dan
4. Kerajaan Negeri Kuala Daya.

Kerajaan ini merupakan bagian dari kerajaan Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan oleh Sulthanah Siti Hur Khairil Barri Wal Bahriyah yang berkuasa pada tahun 1520 M – 1553 M.

Negeri Daya sebelumnya dikenal dengan Negeri Indra Jaya, karena pada abad ke V masehi, di pesisir barat Aceh, kalau sekarang berada di Kuala Unga dan Pante Ceureumen Kecamatan Jaya, Asal usul Negeri ini didirikan oleh keturunan raja Negeri Sedu yang melarikan diri dari serbuan armada China yaitu di Panton Bie yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, dalam catatan:

1. Dalam catatan Marcopolo Negeri Indra Jaya disebut dengan “DAGROIAN”, Marcopolo sewaktu pulang dari Tiongkok singgah di negeri ini.
2. Dalam kitab Mahabrata Negeri Indra Jaya disebut dengan BHARAT.

Negeri Indra Jaya dengan pusat pemerintahannya di Kuala Unga, sangat disayangkan sampai dua abad lamanya tidak diketahui sejarahnya, baru pada abad ke VII Masehi pelabuhan RAMI (EL-RAMI) di Lamno Negeri Indra Jaya ramai disinggahi kapal-kapal dagang Asing termasuk dari Negara Arab, Persia, Tiongkok dan India, dan pada abad ke VIII Masehi pelabuhan EL-RAMI di Lamno Negeri Daya sudah menjadi bandar yang rutin disinggahi oleh pedagang dari Negara Arab dan Yunani.

Pada abad ke X Raja Kerajaan Perlak yaitu Meuruah Pupok dengan gelar Teungku Sangob atau Meureuhom Unga putera Makhdum Malik Musir Ibni Makhdum Malik Ishaq Ibni Makhdum Malik Ibrahim Johan Berdaulat, merebut kembali pusat Pemerintahan Indra Jaya dari pendudukan armada China, tepatnya di Gampong Keude Unga sekarang.

Pada abad ke XIV Masehi Kekuasaan Portugis di Negeri Keuluang dilumpuhkan oleh “Sulthan Alaidin Ri’ayat Syah” dan membentuk Kerajaan Negeri Daya. Pada masa kepemimpinannya Negeri Daya mengalami perubahan besar, rakyatnya hidup makmur dan sejahtera sekaligus merupakan puncak Kejayaan Negeri Daya.

ASAL KETURUNAN RAJA DI KERAJAAN NEGERI DAYA



Gambar : Makam Poe Teumereuhom

Raja Negeri Daya Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah atau lebih dikenal dengan “Po Teumeureuhom”, atau “Cik Po Kandang” adalah putra raja madat “Raja Pidie” yang menakluk Negeri Darul Kamal dan Kuta Alam, dan sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, atau dalam sejarah lebih dikenal dengan nama “Sulthan Inayat Syah” putera raja “Abdullah Malikul Mubin”, selanjutnya keturunan ini menjadi cikal bakal Raja-raja di Aceh Darussalam, “Sulthan Inayat Syah” dikaruniai 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, 3 orang anak laki-laki yaitu:

1. Sulthan Muzaffar Syah mewarisi Negeri Darul Kamal.
2. Sulthan Munawar Syah mewarisi Negeri Kuta Alam.

3. Sulthan Salathin Alaidin Ri'ayat Syah menjadi raja di Kuta Madat, Negeri Pidie dan terakhir sebagai raja di Negeri daya, atau lebih dikenal dengan "Po Teumeureuhom", atau "Cik Po Kandang".

RIWAYAT SINGKAT KERAJAAN INDRA JAYA SEBELUM DITAKLUK MENJADI KERAJAAN NEGERI DAYA.

Pada abad ke XI Masehi Negeri Indra Jaya kedatangan serombongan bangsawan dari samudera Pasai yaitu rombongan "Datuk Paghu" putera maha raja "Bakoi Ahmad Permala Syah" yang berkuasa di samudera pasai pada tahun 801-831 M, "Datuk Paghu" dianugerahi tiga orang putra, yaitu:

1. Johan Pahlawan atau Syeh Johan
2. Datok pahlawan syah
3. Muda Perkasa

Rombongan ini membuka daerah yang masih runyam dan membangun negeri baru, negeri yang dibangunnya dibagi kepada putranya, yaitu:

1. Wilayah Negeri Kuala Daya meliputi Lam Beusoe di kuasai dan diperintahkan oleh "Johan Pahlawan" Atau Syeh Johan".
2. Wilayah Negeri Keuluang di kuasai dan diperintahkan oleh "Datok Pahlawan Syah" yang dikenal sebagai pemberani.
3. Wilayah Negeri Lamno, di kuasai dan diperintahkan langsung oleh "Datuk Paghu" dibantu oleh putranya yang bungsu yaitu "Muda Perkasa".

Berkat kesungguhannya ketiga datuk ini dalam beberapa puluh tahun daerah kekuasaannya menjadi makmur dengan hasil kehutanan dan pertanian terutama di Negeri Keluang sangat dikenal dengan Negeri penghasil Lada. Pada pertengahan abad ke XIII Masehi, Negeri Keuluang telah menjalin hubungan dengan Portugis sehingga semua hasil lada di Negeri Keuluang dimonopoli oleh portugis, dan pada akhirnya portugis menanamkan pengaruhnya dalam bidang politik pemerintahan Negeri Keuluang, sampai-sampai pada saat itu pahlawan menganggap dirinya sebagai Eropa (Portugis).

PENAKLUKAN KERAJAAN NEGERI INDRA JAYA MENJADI KERAJAAN NEGERI DAYA



Pada abad ke IV Negeri Indra Jaya kemudian disebut Negeri Daya dirintis oleh “Raja Abdullah Malikul Mubin” yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan menghalangi penjajahan di pantai barat Aceh oleh bangsa Portugis. “Raja Abdullah Malikul Mubin” diusianya yang sudah sangat tua juga keberadaannya sangat dibutuhkan pada pusat pemerintahan Aceh dan Pidie, karena “Inayat Syah” membutuhkan nasehat-nasehat beliau dalam menghadapi ancaman Portugis di wilayah utara, “Raja Abdullah Malikul Mubin” meninggalkan Negeri Daya secara mendadak dan kembali ke Aceh dan Pidie dan Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah yang waktu itu berkedudukan di Kota Madat diberi tugas untuk pergi ke Negeri Indra Jaya (Negeri Daya) bersama 300 bala tentaranya, yang bertugas sebagai:

1. Pemersatu antara raja-raja di Negeri Indra Jaya, yang sedang diadu domba oleh Bangsa Portugis.
2. Berdakwah untuk mengembangkan agama islam yang pada saat itu sudah tidak murni lagi di Negeri Indra Jaya (Negeri Daya).

Setibanya di Negeri Indra Jaya “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” pada satu tempat yang dikenal dengan “Beureuha” sekarang lebih dikenal dengan Pante Cermen, Imuem Beureuha dan Imuem Katong dapat ditundukkan, di tempat ini beliau dan bala tentaranya bermukim selama tiga musim panen, guna mempersiapkan perbekalan sebelum menakluk Negeri Indra Jaya, selanjutnya melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan rakit bambu melalui sungai yang airnya sangat deras menuju kewilayah pesisir Negeri Indra Jaya, sesampai di Negeri Lamno terjadi ketegangan dengan penguasanya yaitu “Datuk Paghu” dan puteranya “Muda Perkasa” dengan penuh kebijaksanaan “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” segera dapat mengatasinya, dan akhirnya “Datuk

Paghu” dan puteranya “Muda Perkasa” mengaku takluk. Kemudian melanjutkan perjalanannya sampai mendekati muara sungai, dan beliau mendarat pada satu tempat yang sampai sekarang di kenal dengan nama Gampong Darat. Raja “Johan Pahlawan” sebagai penguasa Negeri Kuala Daya, segera di hubungi oleh diplomasi jihad yang deplomatis sehingga Negeri Kuala Daya dapat ditaklukkan. Setelah menakluk dua Negeri ini beliau beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke tujuan pokok yaitu menakluk Negeri Keuluang dan mengusir pendudukan portugis yang sedang merong-rong “Datuk Pahlawan Syah” tapi yang sangat menyedihkan “Datuk Pahlawan Syah” telah dibujuk dan diikat melalui bermacam-macam perjanjian oleh Portugis, ditambah lagi selera hidupnya yang ala eropa, sehingga berulang kali hubungan deplomasi yang di bangun oleh “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” dan bala tentaranya mengalami jalan buntu, dan pada akhrihnya terjadi pertempuran sengit, dalam pertempuran ini pada awalnya Portugis membantu sepenuhnya angkatan perang “Datuk Pahlawan Syah”, tapi pada saat posisi pertahanannya mulai dikuasai oleh pasukan “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” maka portugis mengkhianati “Datuk Pahlawan Syah” dan mundur ke Kuala Keuluang dan kembali kepangkalannya di Goa. Berkat kebijaksanaan baginda “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” tetap menempatkan “Datuk Pahlawan Syah” yang takluk tanpa syarat pada posisinya semula, hanya saja urusan luar negeri dan perdagangan yang ditangani oleh baginda, ketentuan ini juga berlaku bagi “Datuk Muda Perkasa” dan Raja Johan Pahlawan.

Dengan ditakluknya Negeri Keuluang maka seluruh kekuatan “Datuk Paghu” telah bersatu, dan terbentuklah pemerintahan baru di Indra Jaya yang di pimpin oleh raja pertama yaitu : “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah”, dengan nama wilayahnya Negeri Daya.

Setelah tiga Negeri ini berhasil ditaklukkan, “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” mengirim utusan diplomasi ke Negeri Kuala Unga dan mengajak untuk bersatu di bawah bendera Negeri Daya, usaha ini tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga diseluruh lembah Daya yang membentang:

1. Utara dengan Glee Geurutee.
2. Selatan dengan Krung No.

3. Barat meliputi seluruh pesisir pantai.

PEMERINTAHAN NEGERI DAYA

Kepada empat Negeri yang telah ditakluk, “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” mengkoordinir keempat Negeri ini yang masing-masing memperoleh hak otonom untuk mengatur Kerajaan sendiri, antara lain:

1. Wilayah Negeri Kuala Daya meliputi Lam Beusoe tetap di kuasai dan diperintahkan oleh “Johan Pahlawan” atau Syeh Johan”.
2. Wilayah Negeri Keuluang Lamno tetap di kuasai dan diperintahkan oleh “Datok Pahlawan Syah” yang dikenal sebagai pemberani.
3. Wilayah Negeri Lamno, tetap di kuasai dan diperintahkan oleh “Muda Perkasa”.
4. Wilayah Negeri Unga , tetap di kuasai dan diperintahkan oleh keturunan “Meurah Pupok” atau “ Teungku Disagob”.

Pusat pemerintahan (Ibu kota) Negeri Daya “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” menetapkannya di “Lamkuta” dan “Kuta Dalam” kedua tempat ini sekarang terletak di Gampong Glee Jong, Kemukiman Kuala Daya. Untuk kelancaran administrasi pemerintahan “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” menetapkan jabatan dan satuan tugas serta mengangkat:

1. Seorang dengan jabatan Wazir merangkap Katibul Muluk.
2. Seorang dengan jabatan Hakim Tinggi.
3. Seorang dengan jabatan Mufti Besar.
4. Seorang dengan jabatan Panglima.
5. Beberapa orang Menteri Negeri.
6. Empat orang dengan jabatan Staf Sulthan dalam setiap sidang penting yaitu masing-masing dijabat oleh raja Negeri.

Dalam masa pemerintahannya, “Sulthan Salathin Alaidin Ri’ayat Syah” telah mengukir sejarah karena dalam masa pemerintahannya telah mampu menciptakan kesejahteraan dan kejayaan bagi rakyatnya di Negeri Daya, pengembangan ekonomi Negeri Daya diciptakan melalui:

1. Membangun dan mengembangkan usaha pertanian dengan membangun irigasi, perعتakan sawah baru, yang dirintis sejak baginda mendarat di BEUREUHA.

2. Menumbuh kembangkan sikap solidaritas di Negeri Daya.
3. Mendidik generasi muda sebagai tentara dan tenaga professional dalam rangka menjaga kedaulatan Negeri.
4. Membuka usaha-usaha perkebunan dengan memfasilitasi modal usaha yang cukup kepada rakyatnya yang melakukan usaha disektor perkebunan.
5. Mendirikan pondok pendidikan islam agar Rakyatnya dapat mendalami ilmu agama, karena sebelumnya telah berantakan.

Ditengah kesejahteraan dan kejayaan, rakyat Negeri Daya kembali berduka karena tepatnya pada 7 hari bulan Ra'jab 913 Hijriah baginda "Sulthan Salathin Alaidin Ri'ayat Syah" wafat, dan dimakamkan dipuncak bukit di Gampong Gle Jong yang sejak saat itu diabadikan namanya yaitu Gle Kandang. Baginda meninggalkan dua orang anak, yaitu:

1. Raja Unzir.
2. Puteri Nurul Huda atau Siti Hur.

Raja Unzir menggantikan posisi ayahnya untuk memerintahkan Negeri Daya, dalam masa yang sangat singkat (hanya beberapa tahun saja), sedangkan Puteri Nurul Huda atau Siti Hur menikah dengan "Raja Ali Mughayat Syah" putera raja Aceh Darussalam "Sulthan Syamsul Syah" yang berkuasa pada tahun 902 – 916 Hijriah.

KERAJAAN NEGERI DAYA MENJADI KESATUAN KERAJAAN ACEH DARUSSALAM

Sulthan Syamsul Syah" digantikan oleh puteranya "Sulthan Ali Mughayat Syah" berkuasa pada tahun 916 – 936 Hijriah atau tahun 1511 – 1530 Masehi, dalam masa pemerintahannya selalu disibukkan oleh berbagai kegiatan untuk memerangi Portugis diseluruh perairan Nanggroe Aceh Darussalam, sementara Adiknya "Raja Ibrahim" ditugaskan di wilayah Aru, guna membendung armada Portugis dibagian pesisir timur Nanggroe Aceh Darussalam, dengan jabatan "Raja Muda" dan "Raja Muda" wafat di Aru pada tahun 930 Hijriah. Untuk menggantikan pimpinan di Aru baginda "Sulthan Ali Mughayat Syah" segera mengutuskan "Raja Unzir", sehingga pada saat itu Negeri

Daya tidak memiliki Pimpinannya, dan sejak saat itu pula Kedaulatan Negeri Daya menjadi kerajaan inti Aceh Darussalam, disamping Pidie yang dipimpin serta dikendalikan langsung oleh baginda “Sulthan Ali Mughayat Syah”, sebagai perwakilan pemerintahan di Negeri Daya baginda “Sulthan Ali Mughayat Syah” menetapkan Puteri Nurul Huda atau Siti Hur isterinya untuk menjalankan pemerintahannya di Negeri Daya. Tepatnya pada bulan Jumadil Awal tahun 931 Hijriah atau tahun 1526 Masehi “Raja Unzir” wafat di Aru.

Baginda “Sulthan Ali Mughayat Syah” mangkat pada hari Selasa 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau 1530 Masehi, maka sejak saat itu Puteri Nurul Huda atau Siti Hur isteri Baginda “Sulthan Ali Mughayat Syah” berkuasa penuh di Negeri Daya pada tahun 93 - 960 Hijriah atau tahun 1530 - 1554 Masehi, dan beliau mangkat pada hari Kamis tanggal 11 Muharram tahun 960 Hijriah atau tahun 1554 Masehi.

Setelah mangkatnya Puteri Nurul Huda atau Siti Hur isteri Baginda “Sulthan Ali Mughayat Syah” sejak saat itu pula Negeri Daya mengalami kemunduran, ini semua disebabkan jauhnya hubungan dengan pemerintahan pusat, dan sering kali timbul peperangan antara empat raja di Negeri Daya, karena memperebutkan pajak Lada, peperangan ini sering timbul sampai dua abad lamanya.

Semenjak Kerajaan Aceh Darussalam di perintahkan oleh “ Raja Sulthan Jamalul Alam Badrul Munir” atau “Po Teu Jamaloy” Negeri Daya kembali mendapat perhatian khusus.

TRADISI PADA KERAJAAN NEGERI DAYA

Sulthan Jamalul Alam Badrul Munir” atau “Po Teu Jamaloy” yang berkuasa pada tahun 1711 – 1735 Masehi, dalam mengambil kebijakannya kurang mendapat sambutan dan tidak disukai oleh Pembesar-pembesar kerajaan di Aceh, sehingga baginda tidak memperoleh dukungan kuat untuk kekuatan pemerintahan pusat“ oleh karena itu baginda sering melakukan kunjungan-kunjungannya untuk mencari simpati dari raja-raja kecil yang merupakan kesatuan dari kerajaan Aceh Darussalam.

Baginda “ Sulthan Jamalul Alam Badrul Munir” atau “Po Teu Jamaloy” melakukan lawatan khusus ke Negeri Daya untuk menertibkan

pemerintahan yang sudah semeraut, sesampainya di Negeri Daya Baginda menghimpun semua raja-raja, kepala adat dan unsure lain yang ada kaitannya dengan pemerintahan Negeri Daya, pada kesempatan itu baginda menetapkan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh segenap unsur di Negeri Daya, diantaranya:

1. Kedaulatan Raja-raja di Negeri Daya tetap berjalan sebagaimana mestinya, hanya pajak usaha yang tetap disetor kepada Raja Aceh Darussalam.
2. Keturunan hakim tinggi pada masa “Po Teumeureuhom” ditunjuk sebagai koordinator urusan kehakiman serta melakukan perdamaian jika terjadi perselisihan atau sengketa di antara Raja-raja di Negeri Daya.
3. Untuk mengenang jasa “Po Teumeureuhom” menetapkan upacara agung yang diselenggarakan pada setiap 10 Zulhijjah sebagaimana yang selalu diselenggarakan oleh “Po Teumeureuhom”, yaitu upacara “Seumuleng dan Peumeunab” merupakan upacara kenegaraan pada setiap tahunnya, dan ditentukan pula tata cara pelaksanaannya serta badan pelaksana dari turun temurun,.
4. Dalam pelaksanaan upacara “Seumuleng dan Peumeunab” yang merupakan upacara kenegaraan, sehingga ditetapkannya pula standard perlengkapan upacara, meliputi:
 - a. Sebidang tanah lapang sebagai alun-alun yang ditengahnya dibangun “balee astaka di Raja” sebagai tempat pelaksanaan upacara, dan disekelilingnya untuk para pengunjung upacara.
 - b. Tidak jauh dari “balee astaka di Raja” dibangun “Balee Peuniyoh” untuk para tamu dan pembesar Negeri yang diundang untuk menyaksikan upacara.
 - c. Jauh sedikit dari “balee astaka di Raja” dibangun “Balee Meunaroi dan Jambo Dabeuh” yang digunakan sebagai tempat dihidangkan kenduri (makanan) dan tempat menyimpan benda-benda “Po Teumeureuhom” sebelum dipakai dalam upacara. Disebelah kiri pentas di Raja duduk para pemimpin peut sagoe Daya yaitu: Teuku Alue Encek, Teuku Muda Kuala, Teuku Datok Johan Syah Banda Meunaga (Kuala Daya), Teuku

Datok Perkasa Lamno, dan Keturunan Datok Pahlawan Syah Keuluang.

- d. Tata tertib upacara “Seumuleng dan Peumeunab” yang merupakan upacara kenegaraan, dilaksanakan sebagai berikut:
- e. Raja memasuki “balee astaka di Raja” dengan diiringi oleh “Wazir” serta pembantunya dijaga oleh panglima. Para hadirin berdiri serta menyambut kedatangan Raja dengan meneriakkan “Daulad Tuanku”.
- f. Raja mengambil tempat dan dua “Khadam” duduk mengipas raja.
- g. Acara pembukaan oleh “Wazir” dan mempersilahkan raja untuk menyampaikan amanat kepada rakyatnya dan kepada para hadirin. Pembacaan “Do’a atau Khatam Payang” yang dibacakan oleh “Mufti Besar Negeri Daya atau Mahdum Syah Babah Dua”, atau oleh “Petua Mahkamah Agama Rantoe XII Keuluang Teunom yaitu Teungku Chik Rumpet”.

KERAJAAN NEGERI DAYA DIMASA YANG AKAN DATANG

Pewaris tahta ke-12 yaitu “Raja Saifullah”, bertekad untuk mengembalikan marwah Negeri Daya, serta menciptakan kemakmuran bagi rakyat di Negeri Daya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Negeri Daya sebagaimana masa leluhurnya. Untuk mencapai maksud tersebut, Baginda Raja Saifullah selalu memperjuangkannya melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Pemerintah Aceh agar dapat mengalokasikan dana untuk membangun taman Kerajaan Negeri Daya, yang dilengkapi dengan fasilitas:



Foto : Raja Negeri Lamno Daya Teuku Saifullah

1. Pelabuhan.
2. Pagar keliling.
3. Gerbang masuk dan Keluar.
4. Jalan lingkungan
5. Pos Security
6. Gedung Mesium Kerajaan Negeri Daya
7. Monumen Kerajaan Negeri Daya.
8. Mushalla.
9. Gedung “Balee Astaka Di Raja”.
10. Gedung “Balee Peuniyoh”.
11. Gedung “Balee Meunaro”.
12. Gedung “Balee Jambo Dabeuh”
13. Instalasi air bersih
14. Taman mainan anak-anak.

Menurut Baginda Raja Saifullah, dana yang di keluarkan untuk pembangunan taman Kerajaan Negeri Daya, dapat memberi dampak yang sangat positif, diantaranya:

1. Masyarakat di Negeri Daya akan sadar terhadap kedaulatan dan kemampuan pendahulu mereka dengan diwariskan peradaban yang sangat berharga di abad ini, sehingga mereka akan tumbuh menjadi generasi yang aktif serta menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi leluhurnya.
2. Menjadi situs yang sangat bersejarah, dan akan menjadi objek Wisata di Kabupaten Aceh Jaya yang sangat diincar oleh turis manca Negara terutama Amerika Serikat, Inggris, Portugal dan Negara-negara Arab, dengan sendirinya menjadi Income bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Menjadi symbol (Icon) objek wisata di kabupaten Aceh Jaya, sehingga Daerah ini akan dikenal diseluruh dunia seperti sedia kala.
4. Sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah, karena Negeri Daya merupakan titik pertahanan wilayah Pantai barat Aceh dalam melawan Armada Cina dan penjajahan Portugis, serta Kerajaan Negeri Daya merupakan kerajaan inti Kerajaan Aceh Darussalam.
5. Pembangunan ini menjadi modal awal untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Jaya.

6. Negara yang maju adalah Negara yang menjaga Situs Peradabannya, yang merupakan peninggalan pendahulunya, dan akan kehilangan jati dirinya disaat dia mengabaikan peradabannya, dan hina dimata Negara lain yang menjaga peradabannya.



Foto : Acara Seumeuleung Raja- Raja di Lamno Daya

Selanjutnya Baginda Raja Abdullah, memperjuangkan kemandirian masyarakatnya dalam bidang ekonomi melalui pengembangan sector usaha di Bidang Pertanian, peternakan, Perkebunan, Perikanan, kelautan, perdagangan, industry rumah tangga dan bidang pertambangan serta menciptakan akses informasi, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan dalam bidang kesehatan dan pendidikan, karena setelah ekonominya mapan sudah pasti Kesehatan dan pendidikan rakyat saya akan pasti dapat terpenuhi, kuncinya hanya pemberdayaan ekonomi yang perlu kita kembangkan.

Dalam perkembangannya, sejarah kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya memiliki dinamikanya tersendiri yang melahirkan kekayaan budaya yang sangat unik, elok dan bermartabat. Kabupaten Aceh Jaya yang dihuni oleh suku bangsa Aceh tulen adalah suku bangsa yang masih sangat kuat memegang nilai-nilai keadatan, walaupun tidak bias dipungkiri perubahan juga telah mewarnai berbagai dimensi kebudayaan yang dimiliki. Untuk itu tentu tidak salah jika penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dimana Kabupaten Aceh Jaya sebagai salah satu kota prioritas di tahun 2018 ini sangat relevan, apalagi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya saat ini mengusung visi: “Visi- Mewujudkan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya yang sehat, Kejayaan, Agama, Tangguh, Insfratuktur dan Informatika (Gerbang Raja Sejati).”. Sebagai sebuah kajian pokok pikiran kebudayaan, penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) ini mengkaji 11

objek kebudayaan yang adadi Kabupaten Aceh Jaya.

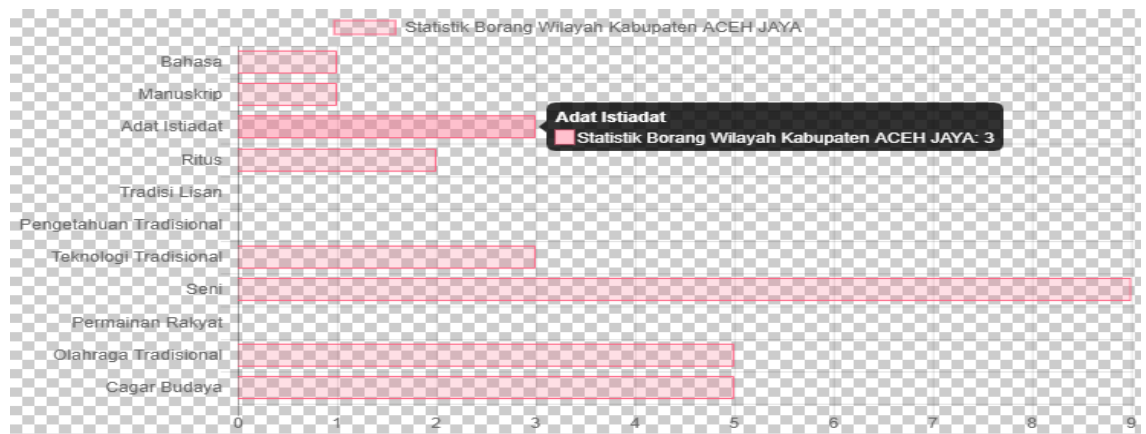
Penelusuran dan pengidentifikasian ke-11 objek kebudayaan yang menjadi pokok-pokok pikiran kebudayaan secara kontekstual sangat kompleks. Untuk itu pengkajian ini dalam proses penelitian mengoperasionalkan sejumlah metode dengan tujuan mendapatkan informasi yang valid sesuai dengan konteks objek kajian. Operasionalisasi sejumlah metode penelitian dimaksudkan untuk dapat saling mengisi dalam mendukung validasi informasi atau data yang diperoleh di lapangan, selain itu juga untuk mengatasi rentang waktu penelitian yang berlangsung singkat, kurang lebih satu bulan.

Metode penelitian yang dikembangkan dilapangan adalah adalah 2 cara , yaitu kajian pustaka dan Tanya jawab dengan pelaku seni dan budaya daerah.

Dari hasil survey dan penelitian yang dilakukan, meskipun potensi objek kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya sangat besar, namun belum ada lembaga sekolah dan perguruan tinggi yang khusus membuka jurusan salah satu objek kebudayaan (terutama jurusan seni-budaya). Hanya saja terdapat dua (2) Sekolah yaitu; SMK Negeri 1 Teunom dan SMK Negeri 1 Calang yang memiliki jurusan yang ada kaitannya dengan bidang kebudayaan Tata Boga dan Busana. Sedangkan untuk Lembaga Pendidikan Tinggi Aceh Jaya belum memilikinya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang mengacu pada instrumen borang OPK, telah teridentifikasi sejumlah jenis objek kebudayaan, mulai dari objek kebudayaan berupa; tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisonal; seni; bahasa; permainan rakyat; olahraga tradisional; dan cagar budaya. Secara rinci ditemukan jenis OPK bahasa terdapat 2 (dua) objek bahasa, 5 jenis objek manuskrip, 25 jenis objek adat istiadat, 3 jenis objek ritus, 6 jenis objek tradisi lisan, 5 jenis objek pengetahuan tradisional, 9 jenis objek teknologi tradisional, 13 jenis objek seni, 7 jenis objek permainan rakyat, 6 jenis objek olahraga tradisional, dan 7 jenis objek cagar budaya. Untuk lebih jelas data statistik Borang OPK Kabupaten Aceh Jaya, dapat dilihat grafik dibawah ini:

Tabel 1:



Statistik Data OPK Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Ka. Aceh Jaya 2018

Beberapa objek kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya yang ada, cenderung mengalami kepunahan, oleh karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu objek kebudayaan. Objek kebudayaan yang banyak mengalami kelemahan SDM dan kelembagaan diantaranya; objek tradisi lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan, dan olahraga tradisional. Adapun pada objek ritus kekurangan SDM pada aspek penerjemah naskah-naskah kuno.

Keseluruhan objek kebudayaan yang ada, memang secara faktual masih ada yang bertahan dan dilaksanakan, namun frekuensi pelaksanaannya sudah sangat minim oleh karena kurangnya sarana dan prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan data dan informasi masih terdapat sapras jenis objek kebudayaan tertentu berupa lembaga atau dewan adat, kelompok atau komunitas masyarakat, dan sapras yang disiapkan oleh pemerintah yang bersifat tentatif, seperti sapras pertunjukan dan pagelaran senibudaya, serta promosi kerajinan dan kuliner tradisional dalam setiap event seperti ; Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) yang digelar 4 Tahunan, Festival Aceh Jaya Gemilang yang diadakan pada setiap Momen HUT Aceh Jaya yang jatuh pada setiap tahunnya.

Problem mendasar pelestarian, pembinaan, pengembangan ,dan pemajuan keseluruhan objek kebudayaan di Kabupaten Aceh Jaya,

disamping factor kesadaran internal masyarakat dalam menjaga khazanah kebudayaanya, juga tidak terlepas dari konfogurasi globalisasi, terutama dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup generasi muda yang berimplikasi pada kurangnya minat, perhatian, kecintaan, dan sense of belonging terhadap nilai-nilai luhur dan budaya suku bangsanya. Oleh karena itu, upaya pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat berbasis iman dan takwa melalui visi Visi- Mewujudkan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya yang sehat, Kejayaan, Agama, Tangguh, Insfratuktur dan Informatika (Gerbang Raja Sejati).

Pembangunan ber budaya dan beradat saat ini, sangat perlu didukung dan diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan oleh pemerintah pusat, baik dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta regulasi yang mendukung percepatan pemajuan kebudayaan. Dengan tersusunnya pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Jaya ini, dapat menjadi momentum untuk menyusun desain program yang lebih strategis dan produktif serta sistematis dalam pemajuan kebudayaan Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya.

BAB II

PROFIL KABUPATEN ACEH JAYA

2.1. Tentang Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk pada tanggal 22 Juli 2002, merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Wilayah administrasi terdiri dari 9 kecamatan, 21 mukim dan 172 desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Calang, yakni suatu wilayah yang terletak di Krueng Sabee. Kabupaten Aceh Jaya, khususnya kecamatan Jaya terkenal dengan profil penduduknya yang khas. Sebagian penduduk Kecamatan Jaya ini berprofil seperti orang Eropa di mana ada yang berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Mereka dipercaya merupakan keturunan prajurit Portugis pada abad ke-16 yang kapalnya terdampar di pantai Kerajaan Daya, dan ditawan oleh raja kawasan itu.

Para prajurit Portugis yang tertawan ini lama-kelamaan masuk Islam, menikah dengan penduduk setempat dan mengadaptasi tradisi Aceh secara turun-temurun. Keturunan mereka saat inilah yang terlihat khususnya di kecamatan Jaya (sekitar 75 km arah barat daya Banda Aceh). Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, secara susunan organisasi pada tahun 2005 terdiri dari lembaga/instansi berupa 11 Dinas, 3 Badan dan 9 Kantor yang merupakan kantor kecamatan. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil daerah yang bertugas di jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 sebanyak 1.148 orang. Sementara itu jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 masih sebanyak 20 orang sebagaimana tahun 2004, hanya saja beberapa wakil rakyat mengalami

pergantian antar waktu, terutama disebabkan oleh beberapa anggota DPRD yang meninggal pada saat terjadinya bencana gempa dan tsunami.

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan gampong di kabupaten Aceh Jaya beserta kode pos dan data sensus penduduk 2010. Kabupaten Aceh Jaya memiliki 6 kecamatan dan 172 gampong dengan kode pos 23653-23657 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 76.892 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 39.973 pria dan 36.919 wanita (rasio 108,27). Dengan luas daerah 387.725 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 20 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²), yaitu:

1. Kecamatan Darul Hikmah, sebanyak 19 Gampong
2. Kecamatan Indra Jaya, sebanyak 14 Gampong
3. Kecamatan Jaya, sebanyak 34 Gampong
4. Kecamatan Panga, sebanyak 20 Gampong
5. Kecamatan Krueng Sabee, 17 Gampong
6. Kecamatan Pasie Raya, 14 Gampong
7. Kecamatan Sampoiniet, 19 Gampong
8. Kecamatan Setia Bakti, 13 Gampong
9. Kecamatan Teunom, 22 Gampong

Total 172 Gampong

Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir Barat pantai Sumatera dengan panjang garis pantai lebih kurang 160 kilometer. Curah hujan rata-rata sepanjang tahun sebesar 318,5 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 19 hari. Suhu udara dan kelembaban udara sepanjang tahun

tidak terlalu berfluktuasi, dengan suhu udara minimum rata-rata berkisar antara 21,0-23,2 °C dan suhu udara maksimum rata-rata berkisar antara 29,9-31,4 °C.

2.1.1 Batas wilayah

Utara	Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie
Selatan	Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat
Barat	Samudera Indonesia
Timur	Kabupaten Aceh Barat

2.1.2 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 didasarkan pada hasil Sensus Penduduk Aceh sesudah bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda wilayah Aceh. SPAN dilaksanakan oleh BPS pada bulan September 2005 dengan hasil jumlah penduduk Provinsi Aceh tercatat sebanyak 4.031.589 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya hasil sensus tersebut sebanyak 60.660 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 31.515 jiwa dan perempuan 29.145 jiwa. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya 82.172 jiwa, terdiri dari 42.653 penduduk laki-laki dan 39.519 penduduk perempuan. Seiring waktu yang terus berubah, hingga tahun 2018 penduduk Aceh Jaya tercatat sebanyak laki-laki 45.476 Jiwa dan Perempuan 42.146 Jiwa. Sehingga total keseluruhan berjumlah 87.622 Jiwa.

2.1.3 Potensi



Gambar : Pesisir Gunung Geurutee, Lamno

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu daerah yang sangat cocok untuk budidaya berbagai jenis komoditi pertanian, baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran, maupun jenis tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa dalam. Kabupaten Aceh Jaya termasuk daerah Zona Pertanian di antara beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Disamping itu lahan yang tersedia untuk budidaya pertanian masih cukup luas. Sub sektor peternakan juga sangat menjanjikan untuk lebih ditingkatkan di daerah ini mengingat wilayah berupa padang rumput yang masih luas tersedia.



Gambar : Makam Poteu Meureuhôm Lam No, Sultan Salatin

Untuk perikanan laut juga menjadi andalan daerah ini karena semua kecamatannya berbatasan langsung dengan samudera Indonesia. Namun setelah terjadinya bencana gempa dan gelombang tsunami, sebagian besar komoditi pertanian mengalami penurunan produksi pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh rusaknya areal budidaya berbagai komoditi tanaman pertanian oleh gelombang tsunami. Seperti tanaman kelapa dalam yang dibudidayakan di sepanjang pantai wilayah ini, mulai dari Teunom sampai kecamatan Jaya, hancur oleh gelombang tsunami. Penurunan produksi tanaman pertanian juga disebabkan lumpuhnya kota Calang sebagai sentra penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian lainnya.

Pada tahun 2005 produksi padi sawah tercatat sebesar 13.844 ton gabah, atau mengalami penurunan yang sangat besar dibanding tahun 2004 yaitu menurun sebesar 74,31 persen dengan total produksi padi sawah pada tahun 2004 sebanyak 53.896 ton. Demikian juga halnya dengan produksi tanaman palawija dan sayur-sayuran yang rata-rata mengalami penurunan di atas 50 persen dibanding produksi tahun sebelumnya.

2.1.4 Demografi

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Jaya, khususnya kecamatan Jaya terkenal dengan profil penduduknya yang khas. Luas: 3.813 km² dengan Ibukota Calang. Aceh Jaya diresmikan tanggal 10 April 2002, sehingga disetiap tahun kelahirannya diadakan festival perlombaan rakyat yang dipusatkan di kota Calang. Untuk jumlah penduduk

Aceh Jaya pada tahun 2014 berjumlah 80.836 Jiwa (sumber: BPS Aceh Jaya tahun 2014). Untuk tahun 2016 jumlah penduduk Aceh Jaya Laki-laki 45.467 Jiwa, Perempuan 42.146 Jiwa, sehingga total penduduk Aceh Jaya berjumlah 87.622 Jiwa.

2.1.5 Latar Belakang Budaya

Corak Utama

Secara umum Aceh juga memiliki banyak budaya khas seperti 10 kebudayaan Aceh yang akan dipaparkan di bawah ini. Mulai dari bahasa yang digunakan, pakaian adat, tari-tarian, rumah adat, dan masih banyak lagi. Aceh sendiri menurut sejarah menyatakan bahwa masyarakatnya sebagian besar adalah sebagai pendatang yang datang dari berbagai asal kemudian menetap dan tinggal di Aceh tersebut. Namun di antara para pendatang tersebut, kabarnya suku Aceh tertua berasal dari Suku Mante yang berasal dari Melayu.

2.1.6 Keragaman Budaya

Pengikat kesatuan budaya suku Aceh terutama ialah dalam bahasa, agama, dan adat khas Aceh. Sejarah menunjukkan bagaimana rakyat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman dan ulama pun mendapat tempat yang terhormat. Penghargaan atas keistimewaan Aceh dengan syariat Islamnya itu kemudian diperjelas dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam UU No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, tercantum bahwa bidang al-syakhsiyah (masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, warisan, perwalian, nafkah, pengasuh anak dan harta bersama), mu`amalah (masalah tata cara hidup sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual-beli, sewa-

menyewa, dan pinjam-meminjam), dan jinayah (kriminalitas) yang didasarkan atas syariat Islam diatur dengan qanun (peraturan daerah). Undang-undang memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun begitu, pemeluk agama lain dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Inilah corak sosial budaya masyarakat Aceh, dengan Islam agama mayoritas di sana tapi provinsi ini pun memiliki keragaman agama.

Keanekaragaman seni dan budaya menjadikan provinsi ini mempunyai daya tarik tersendiri. Dalam seni sastra, provinsi ini memiliki 80 cerita rakyat yang terdapat dalam Bahasa Aceh, Aneuk Jame, Tamiang, Gayo, Alas, haloban, kluet. Bentuk sastra lainnya adalah puisi yang dikenal dengan hikayat, dengan salah satu hikayat yang terkenal adalah Hikayat Prang Sabi (Perang Sabil).

Seni tari Aceh juga mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri, dengan ciri-ciri antara lain pada mulanya hanya dilakukan dalam upacara-upacara tertentu yang bersifat ritual bukan tontonan, kombinasinya serasi antara tari, musik dan sastra, ditarikan secara massal dengan arena yang terbatas, pengulangan gerakan monoton dalam pola gerak yang sederhana dan dilakukan secara berulang-ulang, serta waktu penyajian relatif panjang. Tari-tarian yang ada antara lain Seudati, Saman, Rampak, Rapai, dan Rapai Geleng. Tarian terakhir ini paling terkenal dan merupakan perpaduan antara tari Rapai dan Tari Saman.

Dalam bidang seni rupa, Rumoh Aceh merupakan karya arsitektur yang dibakukan sesuai dengan tuntutan budaya waktu itu. Karya seni rupa lain adalah seni ukir yang berciri kaligrafi. Senjata khas Aceh adalah Rencong. Pada dasarnya perpaduan kebudayaan antara mengolah

besi (metalurgi) dengan seni penempaan dan bentuk. Jenis rencong yang paling terkenal adalah siwah.

Suku bangsa Aceh menyenangi hiasan manik-manik seperti kipas, tudung saji, hiasan baju dan sebagainya. Kemudian seni ukir dengan motif dapat dilihat pada hiasan-hiasan yang terdapat pada tikar, kopiah, pakaian adat, dan sebagainya.

2.1.7 Sejarah Singkat Budaya

Aceh yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati- Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam. Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga Tionghoa yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu. Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam. Sejarah dan perkembangan suku bangsa Aceh juga menarik perhatian para antropolog seperti Snouck

Hurgronje.

Dilihat dari sisi kebudayaannya, Aceh memiliki budaya yang unik dan beraneka ragam. Kebudayaan Aceh ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya melayu, karena letak Aceh yang strategis karena merupakan jalur perdagangan maka masuklah kebudayaan Timur Tengah. Beberapa budaya yang ada sekarang adalah hasil dari akulturasi antara budaya melayu, Timur Tengah dan Aceh sendiri. Suku bangsa yang mendiami Aceh merupakan keturunan orang-orang melayu dan Timur Tengah hal ini menyebabkan wajah-wajah orang Aceh berbeda dengan orang Indonesia yang berada di lain wilayah.

Sistem kemasyarakatan suku bangsa Aceh, mata pencaharian sebagian besar masyarakat Aceh adalah bertani namun tidak sedikit juga yang berdagang. Sistem kekerabatan masyarakat Aceh mengenal Wali, Karong dan Kaom yang merupakan bagian dari sistem kekerabatan.

Pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Demikian juga halnya, Suku Aceh juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memiliki Hukum Adat sebagai turan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan, kesenian berpantun, upacara kematian, ;.

2.1.8 Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Mula dibangun oleh Sultan Saidil Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul pada akhir abad ke-16 M dengan rajanya Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumereuhom Daya. Kerajaan ini berlokasi di wilayah Kecamatan Jaya sekarang ini.

Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini merupakan onderafdeeling dari Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat), salah satu dari empat afdeeling Wilayah Kresidenan Aceh. Afdeeling Westkust van Atjeh merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah pantai barat Aceh dari Gunung Geurute sampai daerah Singkil dan Kepulauan Simeulue. Afdeeling ini dibagi menjadi enam onderafdeeling, yaitu: Meulaboh dengan ibukotanya Meulaboh Tjalang, dengan ibukotanya Tjalang (sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet). Landschapnya meliputi Keulueng, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee, dan Teunom.

Tapak Tuan dengan ibukotanya Tapak Tuan. Simeulue dengan ibukotanya Sinabang. Zuid Atjeh dengan ibukotanya Bakongan. Singkil dengan ibukotanya Singkil Di zaman penjajahan Jepang struktur wilayah administratif tidak banyak mengalami perubahan kecuali pergantian cara penamaan wilayah. Afdeeling diubah menjadi Bunsyu yang dikepalai seorang Bunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai seorang Guncho, dan Landshap menjadi Son yang dikepalai seorang Soncho. Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Barat dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 3 wilayah, yaitu Meulaboh, Calang, dan Simeulue. Wilayah Calang menjadi daerah otonom setelah memekarkan diri dari kabupaten induk menjadi Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002.

Wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari atas 6 kecamatan; Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, dan Jaya. Kabupaten Aceh Jaya berada dalam iklim tropis yang hangat dan lembab. (Aceh Jaya Dalam Angka 2014)

2.1.9 Peraturan Daerah Terkait Kebudayaan

Dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan kebudayaan, Pemerintah Aceh Jaya belum mengeluarkan Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan hukum adat istiadat masih sangat kental di tengah- tengah masyarakat Aceh Jaya. Namun demikian, Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya saat ini sudah menginisiasi sejumlah kebijakan yang dapat menguatkan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Jaya, dan kedepannya Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Aceh Jaya diharapkan merumuskan perda sebagai respon dari UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan oleh pemerintah pusat.

2.1.10 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD Tim Penyusun

Anggota Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya berasal dari berbagai unsur, di antaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Dewan Kesenian Kabupaten Aceh Jaya, Akademisi, Praktisi Seni dan Budaya, Tokoh Masyarakat. Adapun susunan anggota tim sebagai berikut:

Tabel 2
Susunan Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No.	Nama Anggota TIM	Jabatan dalam TIM	Bidang Keahlian
1.	Abul Jabar, S.Pd	Koordinator umum	Kadis Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya
2.	H. Anwar Ibrahim	Koord. Penyusun	Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kab. Aceh Jaya
3.	T. Khairullah, SE. MM	Anggota Penyusun	Ketua DKA Kab. Aceh Jaya
4.	Amirahim, S.Pd.I	Anggota Penyusun	Kabid Kebudayaan Disdik Aceh Jaya
5.	Rahmad, S.Pd.I	Anggota Penyusun	Kasi Sejarah, Tradisi dan Kesenian Disdik Aceh Jaya
6.	Julianto, ST	Anggota Penyusun	Kasi Tenaga Kebudayaan Disdik Aceh Jaya
7.	Suhandi, S.Pd	Anggota Penyusun	Kasi Cagar Budaya dan Permeusiuman Disdik Aceh Jaya
8.	Safrizal, S.Pd	Anggota Penyusun	Pegiat Budaya
9.	Drs. Zurzani	Anggota Penyusun	Pegiat Budaya
10.	Reza Gunaivy,	Anggota Penyusun	Pegiat Kesenian

Selain tim penyusun di atas, dibantu oleh tim kesekretariatan yang terdiri dari sembilan orang, yaitu :

Tabel 3
Susunan Tim Sekretariat PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No.	Nama Anggota TIM	Jabatan dalam TIM	Bidang Keahlian
1.	Reny Syafriani, S.Pd	Kord. Bid Kesekret.	Staf Disdik Kabupaten Aceh Jaya
2.	Nursimah, S.Pd	Anggota Bid Kesekret.	Staf Dikbud Kabupaten Aceh Jaya
3.	Irfandi	Anggota Bid Kesekret.	Staf Dikbud Kabupaten Aceh Jaya
4.	Sulestri	Anggota Bid Kesekret.	Staf Dikbud Kabupaten Aceh Jaya

2.1.11 Proses Pendataan

Proses pendataan yang dilakukan oleh Tim PPKD Kabupaten Aceh Jaya dilakukan berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada sub bab metode penelitian. Beragamnya metode penelitian yang dioperasionalkan dalam kajian ini didasarkan pada kompleksitas 11 pokok pikiran pemajuan kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya.

2.1.12 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan: Pertama, Identifikasi masalah melalui wawancara terbuka terhadap setiap informan atas setiap jenis dari 11 Objek Pemajuan Kebudayaan; tahap Kedua, Masalah yang muncul pada tahap pertama didiskusikan dan merumuskan secara kolektif rekomendasi; dan tahap Ketiga, Masalah dan rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim penyusun baik dalam konteks kebahasaan dan konten dari rekomendasi dan masalah.

2.1.13 Catatan Evaluasi dan Proses Penyusunan

Sebagai implikasi dari keseluruhan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 ini, maka ada beberapa catatan-catatan evaluasi dari Tim kerja, sebagai berikut:

1. Aspek Personal dan Tanggung Jawab Kinerja Tim Penyusun:

Pembentukan tim penyusun hendaknya melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai bidang keahlian terkait dibutuhkan dalam proses penelitian, penginputan, dan pengolahan serta analisis data sehingga terjadi sinergitas tim secara efektif dan produktif dalam menyelesaikan proses penyusunan PPKD.

Tim penyusun memiliki kesibukan masing-masing sehingga progres kerja penyusunan kurang maksimal dan kurang produktif

diakibatkan beberapa anggota tim tidak hadir dalam rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi penyusunan PPKD.

Kordinasi kinerja dan tanggungjawab tugas masing-masing tim penyusun yang dibangun melalui jalur komunikasi medsos terkadang kurang responsif dari anggota tim, menyebabkan diskusi dan proses pemecahana masalah setiap kendala proses kerja penyusunan menjadi lambat dan terhambat.

2. Aspek Waktu dan Prosedur Penyusunan:

Limit waktu penyusunan PPKD sangat singkat dan terbatas, sehingga pelaksanaan survei, pengumpulan data, pendalaman setiap objek PPKD belum maksimal.

Beberapa masukan terkait tahapan-tahapan kinerja penyusunan dari beberapa tim yang efektif kurang diakomodir, sehingga target dan capaian kerja penyusunan kurang sesuai target yang direncanakan. Sistem kerja penyusunan tidak tersusun secara sistemik dan terukur dalam bentuk timeschedule.

3. Proses Pengumpulan dan Pengimputan Data OPK:

Pengumpulan data dan survey setiap OPK masih terdapat diantaranya yang tidak berbasis atau mengacu pada boring dan juknis penyusunan OPK, sehingga berdampak pada proses kelengkapan penginputan di dalam APIK.

Keterlambatan proses input data setiap OPK kedalam APIK berdampak terhadap proses analisis grafik dan table didalam draft PPKD. Sistem APIK belum normal mengakibatkan beberapa data grafik,table dan statistik setiap OPK mengalami eror sehingga

memperlambat proses deskripsi dan narasi dalam draft PPKD.

Beberapa catatan di atas, sekaligus sebagai rekomendasi agar langkah penyusunan tindak lanjut dapat berjalan secara efektif dan maksimal dalam rangka tersusunnya PPKD dan desain program-program strategis pemajuan kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya secara berkualitas.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

3.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Secara spesifik, belum ada lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Aceh Jaya yang memiliki jurusan khusus di bidang kebudayaan atau sekolah/ perguruan tinggi yang khusus dibidang seni budaya. Namun demikian, terdapat beberapa lembaga pendidikan menengah kejuruan memiliki jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan seperti; jurusan bahasa, pariwisata, kerajinan, dan tata boga. Diantara lembaga pendidikan tersebut, yaitu;

Tabel 4

Susunan Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No.	Nama Sekolah Menengah	Jurusan Berhubungan Kebudayaan
1.	SMK Neg. 1 Calang	Perhotelan; Tata Boga; dan Busana
2.	SMK Neg. 1 Teunom	Pariwisata; Perhotelan; dan Multimedia

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

4.1. Manuskrip

Manuskrip adalah semua bahan tulisan tangan peninggalan nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu, dan sebagainya. Terdapat beberapa manuskrip skrip (naskah) kuno yang selama ini tersimpan di penjuru tanah air, sejatinya merupakan sumber peradaban tak ternilai. Manuskrip merupakan sumber pengetahuan yang masih relevan sampai kini, selain nilai-nilai kehidupan.

Khusus di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, berdasarkan hasil pendataan dan survei terdapat 5 manuskrip, sebagai berikut:

Tabel 1
Nama-nama OPK Manuskrip Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No	Nama OPK Manuskrip	Bahasa
1.	Hikayat Poe Teumerhom	Aceh
2.	Surat Tanah Kerajaan Aceh	Aceh
3.	Sarakata Kerajaan Keuluang	Aceh
4.	Obligasi Nyak Sandang	Aceh
5.	Kitab Suci Al-quran (Ukuran Kecil)	Aceh

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Kelima OPK Manuskrip Kabupaten Aceh Jaya di atas masih tersimpan di masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Manuskrip tersebut tertulis dalam bahasa Aceh pada lembaran kertas yang memuat berbagai unsur sejarah, silsilah, ajaran agama dan etika (akhlak).

Semua manuskrip yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya seluruhnya tertulis dalam bahasa Aceh 100% dan tertulis pada bahan kertas 100%.

4.2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan merupakan salah satu jenis warisan kebudayaan masyarakat setempat yang proses pewarisannya dilakukan secara lisan. Tradisi lisan ini terdiri atas cerita rakyat, bahasa rakyat, teka-teki rakyat (Hiem), peribahasa rakyat (Hadis Maja), Syair Aceh (Hikayat) berbalas pantun (Seumapa). Tradisi Tradisi lisan merupakan bagian kekuatan kultural suatu suku bangsa.

Grafik OPK Tradisi lisan di atas menggambarkan ada beberapa jenis tradisi lisan di Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa tradisi lisan tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Nama-nama OPK Tradisi Lisan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No.	Nama OPK Tradisi Lisan	Jenis Tradisi Lisan	Prekw. Pelaksanaan
1.	Hadis maja	Syair yang mengandung nasehat	
2.	Hiem Aceh	Teka-teki aceh	
3.	Hikayat	Bahasa lisan dan tulisan	
4.	Pantun Aceh	Balas pantun	
5.	Seumapa	Balas pantun	
6.	Syae aceh	Buku	

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Tradisi lisan yang terdata pada umumnya dituturkan oleh etnis Aceh. Beberapa jenis OPK tradisi lisan yang disebutkan di atas masih sering disajikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang penting dalam melestarikan tradisi lisan sebagai sumber ilmu pengetahuan pada masa sekarang dan akan datang adalah sangat urgen untuk merevitalisasi tradisi lisan. Di samping itu, dalam kaitannya dengan hal ini penting juga memperhatikan upaya pengembangan potensi, penyusunan langkah-langkah perlindungan termasuk perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan pemanfaatan tradisi lisan sebagai kekuatan kultural yang kreatif.

4.3. Adat Istiadat

Penduduk asli orang Aceh Jaya adalah suku Aceh, suku Aceh masih terbagi lagi menjadi sub-suku yang bahasanya pun berbeda yang mana telah terbagi menjadi berbagai macam dialek seperti: Aceh, Daya, Pante Cermen, Teunom dan lain-lain. Dari semua dialek yang ada, dialek Aceh merupakan dialek yang umum digunakan.

Berdasarkan hasil survei dan pengumpulan data terkait adat istiadat masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, terdapat 4 (empat) jenis objek berkaitan dengan adat istiadat. Di antara nama atau istilah adat istiadat tersebut yaitu:

Tabel : 4

- Khanduri ek rumoh/gedung baru
- Khanduri dara padee
- Khanduri trok thon
- Khanduri syukur nikmat
- Khanduri laot
- Khanduri aneuk yatim
- Khanduri baling
- Khanduri Beureuat
- Khanduri Bungong Kayee
- Khanduri peusunat aneuk
- Khanduri Peutamat Beut (khatam al-quran)
- Khaduri ureung matee
- Khanduru uteun
- Khanduri apam
- Khanduri hakikah
- Khanduri Jak/wo haji
- Khanduri Jak bak jeurat
- Khanduri moulod
- Peutron bijeh
- Seumeuleung Raja Daya
- Upacara Perkawinan Aceh Jaya
- Upacra Peutron Tanoh (Turun Tanah)

Adat istiadat tersebut, berkaitan dengan beberapa jenis, yaitu; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya. Namun sangat disayangkan karena beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat.

4.4. Ritus

Di dalam suatu kelompok masyarakat tentu ada suatu bentuk ritual. Suatu bentuk ritual bukanlah sesuatu yang mandiri, melainkan terkait dengan aspek- aspek lain. Ritual tersebut sebenarnya terkait dengan suatu sistem kepercayaan dan/atau sistem religi.

Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat. Sesungguhnya, masyarakat Aceh Jaya memiliki beberapa perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual.

Berbagai jenis upacara atau ritual dan pesta rakyat berhasil diidentifikasi dalam borang dan hasil survei di masyarakat di sini terdapat 3 jenis. Angka ini nantinya akan terus bertambah seiring proses pengidentifikasian mengingat khasanah ritual masyarakat Aceh Jaya sangat kaya yang belum ter gali dan teridentifikasi yang selama ini.

Dari sejumlah ritus yang ada berdasarkan hasil survei sudah mulai jarang dilaksanakan dalam konteks masyarakat global dewasa ini.

Tabel Tabel 5

Nama-nama OPK Ritus Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No.	Ritual	Konteks Ritual	Pelaksanaan
1	Manoe Safar	Ritual Tolak Bala	Sering
2	Perkawinan Adat Aceh Jaya	Upacara Adat	Sering
3	Seumeuleung	Upacara Kerajaan	Sering

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

4.5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional dapat dipahami sebagai satu bentuk respon kreatif dari suatu suku bangsa dalam menjaga keberlangsungan kehidupannya, sehingga tidak satupun suku bangsa yang tidak memiliki pengetahuan tradisional yang berfungsi untuk melakukan penetrasi terhadap kondisi kehidupan sosial dan kondisi lingkungan alam (environment) di mana mereka berada.

Sebagai suatu suku bangsa, masyarakat Aceh Jaya yang dominanya berupa suku Aceh juga memiliki sejumlah pengetahuan tradisional yang diwujudkan oleh leluhur, dan tidak sedikit pengetahuan tersebut pada dasarnya masih cukup relevan dioperasional dalam mendukung proses hidup dari masyarakat dewasa ini.

Seperti terlihat pada data yang telah berhasil ditemukan menunjukkan sangat beragamnya jenis pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Aceh Jaya. Dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei, terhimpun terdapat $\pm$ 5 jenis OPK

pengetahuan tradisional dari berbagai jenis pengetahuan tradisional. Jumlah ini kemungkinan terus dapat bertambah dalam proses pengumpulan tahap selanjutnya. Jenis-jenis OPK dan pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut berikut:

Tabel 6
Kalsifikasi dan Jumlah OPK Pengetahuan Tradisional

No.	Jenis Penget. Tradisional	Jumlah	Contoh Jenis OPK
1.	Keuneunong Beuleun	2 jenis	Keuneunong Buleun
2.	Beukam Aceh		
3.	Baju Adat perkawinan Keupiah meukutop		
4.	Makanan tradisional, kuah pliek u, kuah jruek drien, keumamah, asam keueng, karah, haluwa drien.		
5.	Rajah		

Sumber: Borang dan APIK PPKD Aceh Jaya Tahun 2018

Berbagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suku bangsa Kaili pada awal kemunculannya tersegmentasi berdasarkan wilayah atau keadaan alam. Artinya, pengetahuan tradisional tersebut muncul diantaranya karena determinisme lingkungan. Besarnya pengaruh konteks lingkungan menjadi salah satu faktor adanya variasi pengetahuan tradisional antar suku bangsa yang bermukim di wilayah pesisir pantai, perbukitan dan hamparan padangluas. Variasi pengetahuan tradisional semakin tinggi sejak penduduk luar mulai masuk membangun relasi dan bertempat tinggal dengan penduduk lokal yang menyebabkan terjadinya penerimaan pengetahuan baru (transfer of knowledge) yang kelak juga menjadi bagian inti dari kebudayaan.

4.6. Teknologi Tradisional

Sejumlah catatan sejarah dan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya Kabupaten Aceh Jaya dihuni oleh penduduk yang bersuku bangsa Aceh sebagai suku bangsa yang dominan di Aceh Jaya, tercatat keberadaannya sudah di wilayah tersebut jauh sebelum terbentuknya NKRI. Sebagai suatu kelompok masyarakat, penduduk Aceh Jaya pada saat itu sangat akrab dan menggantungkan

kehidupannya dengan keadaan alam sekitarnya, yakni lingkungan agraris dan kelautan.

Jejak arkeologis sebagai masyarakat agraris dan nelayan sangat mudah ditemukan melalui keberadaan sejumlah teknologi, baik yang bersifat tradisional ataupun modern. Khususnya teknologi tradisional, beberapa jenis teknologi sampai saat ini masih sangat akrab dan relevan digunakan oleh masyarakat baik sebagai petani ataupun sebagai nelayan. Untuk masyarakat nelayan sebut saja teknologi tangkap seperti; jala, bubee, sementara untuk masyarakat pertanian jauh lebih variatif seperti; meue, tajok, meumpoe, keumukoh, cheumeulho dan sebagainya. Terkait dengan teknologi transportasi, beberapa yang masih bertahan digunakan masyarakat terutama dalam mengangkut material dan produksi pertanian, seperti gorobak dan doka.

Secara umum, dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei, terhimpun terdapat $\pm$ 9 jenis OPK teknologi tradisional dari berbagai jenis. Jumlah ini kemungkinan terus dapat bertambah dalam proses pengumpulan tahap selanjutnya. Jenis-jenis OPK dan pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut berikut:

Tabel 7
Kalsifikasi dan Jumlah OPK Teknologi Tradisional

No.	Jenis Tekno. Tradisional	Jumlah	Contoh Jenis OPK
1.	Nok	10	Alat untuk menarik kayu
2.	Bajak dengan kerbau	2 jenis	
3.	Mesin Teunun Kain		Alat untuk membuat kain, songket dll
4.	Teknologi sistim irigasi	6 jenis	Meueu, tajok, semeula, umpoe, kemeukoh, chemeulho,
5.	Teumalang pot unoe	2 jenis	Jala; bubee
6.	Teupeun parang	2 jenis	Gerubak, becak
7.	Jengki (alat tumbuk padi menjadi beras)	1 jenis	Jalo (sampan)
8.	Tunang pot unoe	3 jenis	Pedang, Rincong, Lumbeng
9.	Weng tube		

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Jika di cermati tabel di atas menunjukkan keberadaan kelompok teknologi berdasarkan peruntukannya, terdiri dari; teknologi transportasi, teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan senjata tradisional.

4.7. Seni

Banyak sekali warisan seni yang wajib dilestarikan sehingga anak cucu kita. Banyaknya seni di Kabupaten Aceh Jaya tentu menjadi bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai salah satu daerah beretnis Aceh, alat musik tradisional sering juga ditampilkan saat ada upacara, pesta, dan ritual adat. Dan beberapa jenis kesenian daerah ini sudah dikembangkan dalam bentuk yang lebih populer bagi generasi muda saat ini. Secara umum, dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei, terhimpun ada ± 13 jenis OPK seni tradisional dari berbagai jenis di Kabupaten Aceh Jaya.

Grafik 7
Klasifikasi dan Jumlah OPK Seni

No.	OPK Seni	Jumlah	Contoh Jenis OPK Seni
1.	Seni Tari	9 jenis	Rapai Saman, rateb meuseukat, ratoeh jaroe, tari laweut, tari pho, tari rapai geleng, tari ranup lampuan dan tari dike pam.
2.	Seni Teater	2 jenis	Cagok aceh, Dalupa aceh
3.	Seni Musik	2 Jenis	Tari kreasi, rapai daboh.

Sumber: Borang dan APIK PPKD Seni Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

4.8. Bahasa

Masyarakat Aceh Jaya dominannya adalah suku Aceh asli sehingga bahasa yang digunakan oleh masyarakat Aceh Jaya adalah Bahasa Aceh dan bahasa aneuk jamee. Sedangkan untuk dialek, berdasarkan data borang dan APIK, paling tidak ditemukan dua jenis dialek bahasa di Aceh Jaya terdapat 2 (dua) dialek yaitu Aceh, lamno dan Teunom. Diantara kedua dialek tersebut yang paling dominan adalah dialek Aceh sedangkan dialek lamno digunakan oleh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Jaya dan Indra. Untuk dialek Teunom sendiri juga hanya digunakan oleh masyarakat kecamatan Teunom dan Kecamatan Pasie Raya.

4.9. Permainan Rakyat

Ada sejumlah permainan rakyat berhasil terhimpun dan terinput dalam APIK, sebagai mana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 9

Nama-nama OPK Permainan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No.	Nama Jenis Permainan	Pelaksanaan	Ket.
1.	Cato rimeung	Sering	
2.	Gasing Aceh (gaseng)	Jarang	
3.	Geulayang tuning	Sering	
4.	Maen Geunteut	Jarang	
5.	Panjat Pinang	Sering	
6.	Patok lele aceh	Sering	
7.	Tarek tambang	Sering	

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Terdapat beberapa jenis permainan rakyat tradisional yang berhasil dihimpun dan telah terinput dalam APIK. Paling tidak ada sekitar 7 jenis permainan rakyat yang telah terangkum dalam instrumen borang penyusunan PPKD. Jumlah tersebut masih bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. RI.

4.10. Olahraga Tradisional

Seperti halnya permainan rakyat tradisional, masyarakat Aceh Jaya juga sejak dahulu memiliki kekayaan khazanah budaya jenis olahraga tradisional. Adapun OPK jenis olahraga tradisional masyarakat yang berhasil terhimpun dalam data borang dan di dalam APIK 2018, berjumlah 6 jenis, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 10

Nama-nama Olahraga Tradisional Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No.	Nama Jenis Olahraga	Pelaksanaan	Ket.
1.	Olahraga Kasti	Sering	
2.	Galah Asin	Sering	
3.	Lari Karung	Sering	
4.	Lomba Jalo (sampan)	Sering	
5.	Silat Geulumbang	Sering	
6.	Sipak bhan	Sering	

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Dari tabel di atas, terdapat beberapa jenis olahraga tradisional yang berhasil dihimpun dan telah terinput dalam APIK. Jumlah tersebut masih

bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. RI.

4.11. Cagar Budaya

Berdasarkan data pada borang APIK 2018 Kabupaten Aceh Jaya terdapat beberapa cagar budaya diantaranya :

1. Makam Jeurat Payang
2. Makam Po Teumeureuhom
3. Makam Raja Teunom
4. Makam Tgk. Sabee Ops
5. Makam istri Pertama Teukeu Umar (istri pertama teuku umar)
6. Tgk. Pasi Keumiro
7. Tgk. Cut Ali (Raja Teunom)

BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

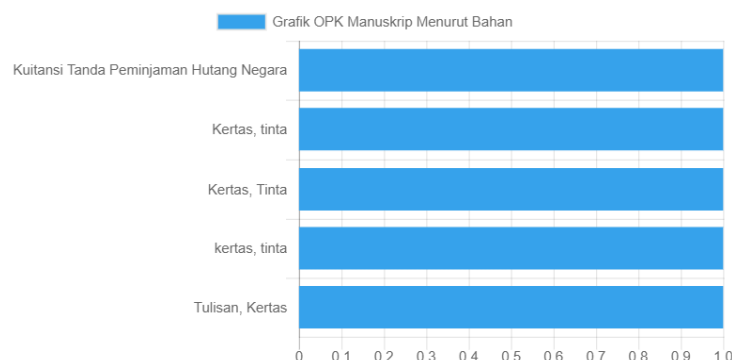
Salah satu pilar pemajuan kebudayaan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Eksistensi dari setiap OPK sebagai kekayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari, terjaga, dan berkembang manakala dimensi SDM dan lembaga kebudayaan di setiap daerah cukup tersedia, baik dari aspek pembuat, pelaku, pemelihara, maupun pengguna budaya itu sendiri.

Trend semakin lunturnya nilai budaya dan kurang terapresiasi ekspresi budaya bangsa, seperti halnya di Kabupaten Aceh Jaya, diakibatkan karena semakin berkurang dan lemahnya SDM dan lembaga budaya yang ada di setiap daerah. Gambaran SDM dan lembaga kebudayaan setiap OPK di Kabupaten Aceh Jaya dideskripsikan secara singkat sebagai berikut:

5.1. Manuskrip

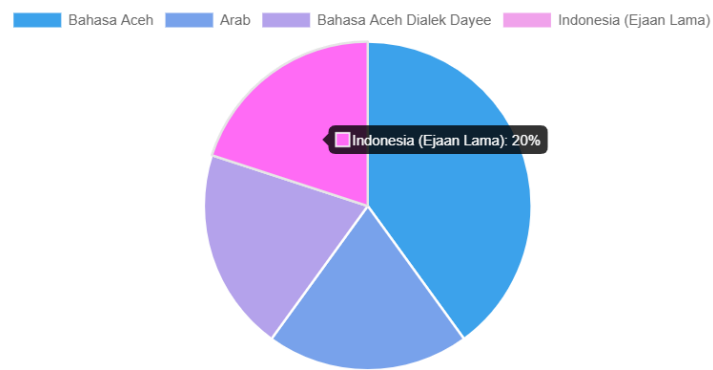
Berdasarkan hasil survei dan pendalaman melalui studi dokumen, interview, dan FGD terkait OPK manuskrip di Kabupaten Aceh Jaya, secara kelembagaan masih kurang terdokumentasi dengan baik, hal ini terindikasi lemah dalam aspek SDM. Kelemahan SDM dalam konteks OPK Manuskrip yang ada di Kabupaten Aceh Jaya terutama pada aspek SDM pembaca dan penerjemah ahli terhadap beberapa naskah-naskah kuno yang ada. Demikian pula dari jumlah pengakses dan lembaga manuskrip. Untuk lebih jelas gambaran pengakses dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Grafik Jumlah Manuskrip OPK menurut Bahan



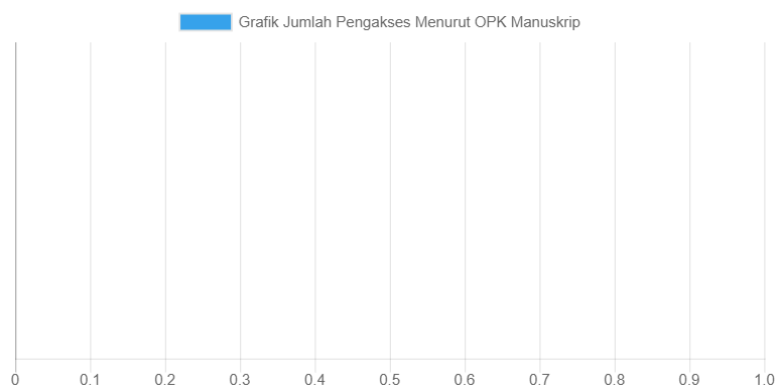
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Gambar 2
Grafik Jumlah Manuskrip OPK menurut Bahasa



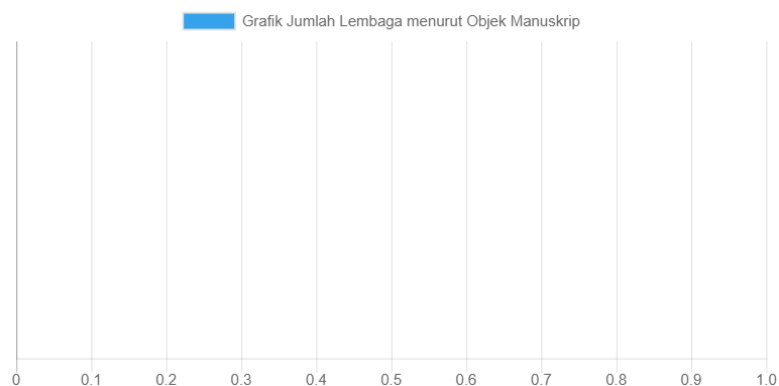
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Gambar 3
Grafik Jumlah Pengakses Menurut OPK Manuskrip



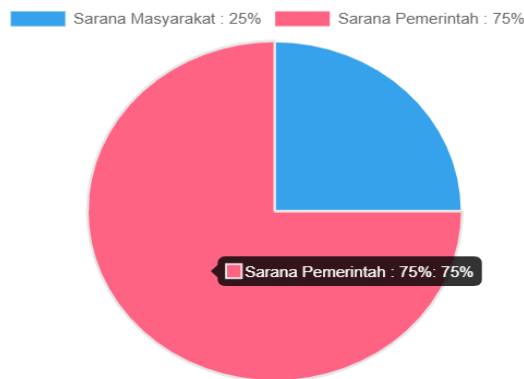
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Gambar 4
Grafik Jumlah lembaga menurut Objek Manuskrip



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Gambar 5
Grafik Jumlah Sarpras yang mendukung OPK Manuskrip

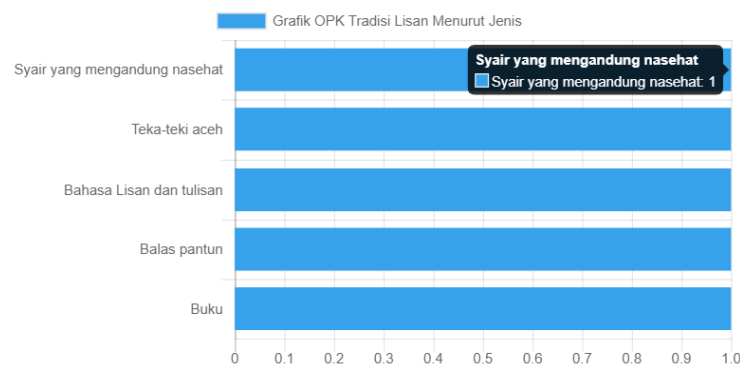


Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

5.2. Tradisi Lisan

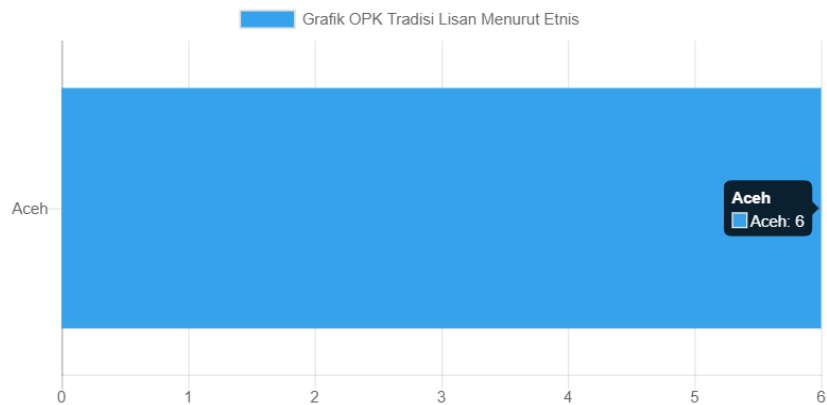
Secara faktual, orang-orang muda yang dapat menghafal tradisi lisan semakin jarang dan tradisi ini terancam punah kalau tidak segera dilakukan usaha perekaman. Namun demikian, usaha seperti ini jelas bukanlah sekadar ikhtiar melestarikan suatu warisan yang segera hilang, melainkan memberikan berbagai dimensi baru dalam pengertian dan apresiasi tentang apa yang dikenal sebagai kebudayaan tradisional. Bersamaan dengan itu, sudah tentu para penuturnya pun semakin berkurang atau langka. Kondisi ini pun terlihat terhadap ketersediaan SDM dan lembaga OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Aceh Jaya.

Grafik 6
Grafik Jumlah Penutur Menurut OPK Menurut Jenis



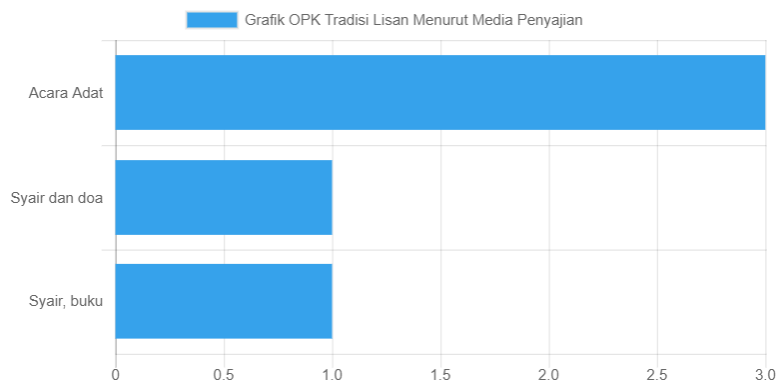
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 7
Grafik OPK tradisi Lisan menurut etnis



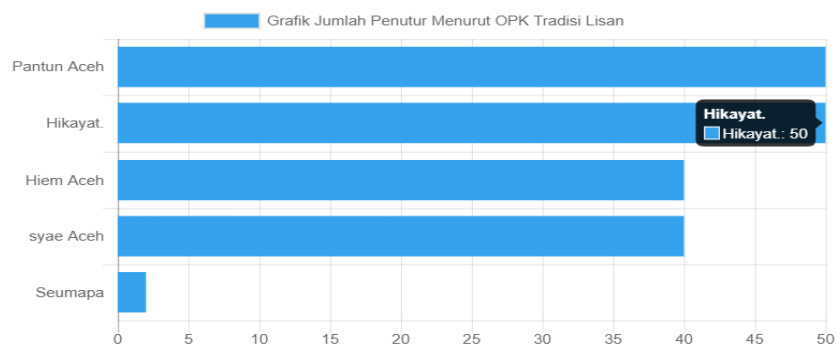
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 8
Jumlah Lembaga menurut Media Penyajian



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Gambar 9
Grafik jumlah penutur menurut OPK tradisi lisan



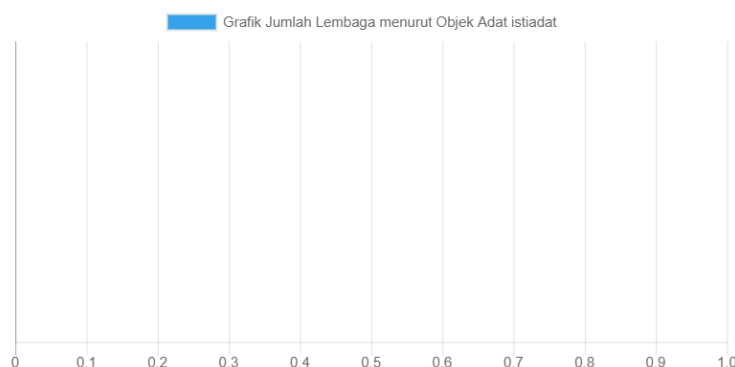
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

5.3. Adat Istiadat

Berkaitan dengan SDM dan lembaga beberapa objek jenis adat istiadat seperti; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya terdapat beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya sebagai pemilik murni adat istiadat tersebut. Hal ini tidak terlepas oleh semakin lemahnya SDM dan lembaga objek tersebut.

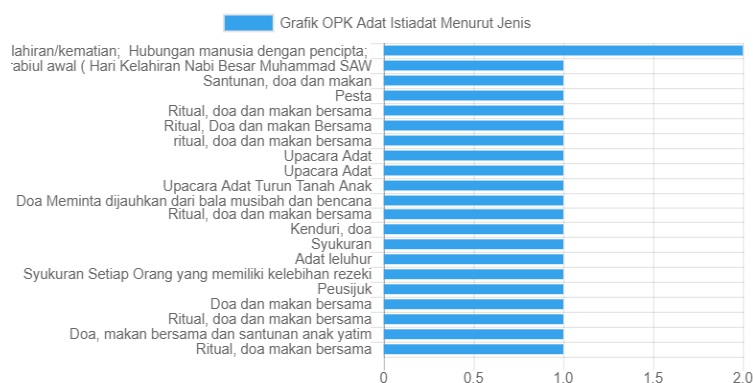
Kelemahan SDM dalam konteks OPK adat istiadat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya terutama pada aspek penguatan pelaku adat. Namun demikian, dengan aktifnya penguatan lembaga MAA (Majeis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Jaya dan DKA (Dewan Kesenian Aceh) Kabupaten Aceh Jaya saat ini sangat prospektif dalam pengembangan SDM adat. Demikian pula, dari aspek kelembagaan.

Grafik 1
Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Adat istiadat



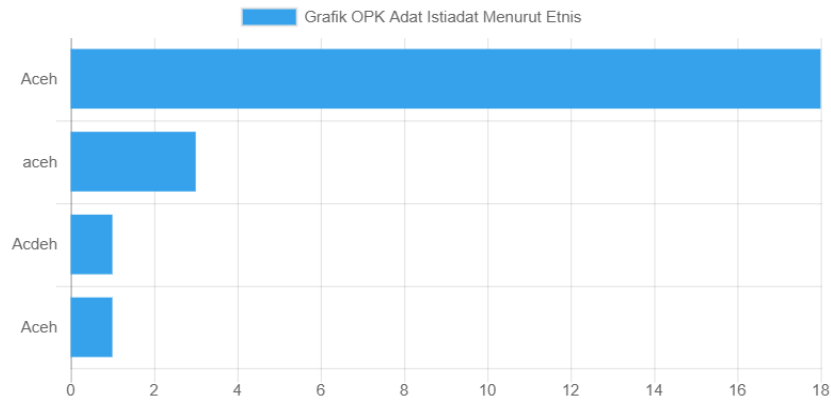
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 2
Grafik OPK Adat istiadat Menurut Jenis



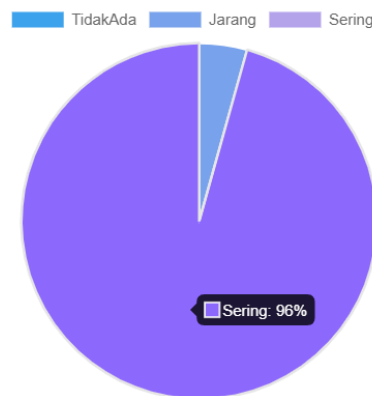
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 3
Grafik OPK Adat Istiadat Menurut Etnis



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 4
Diagram OPK Adat Istiadat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

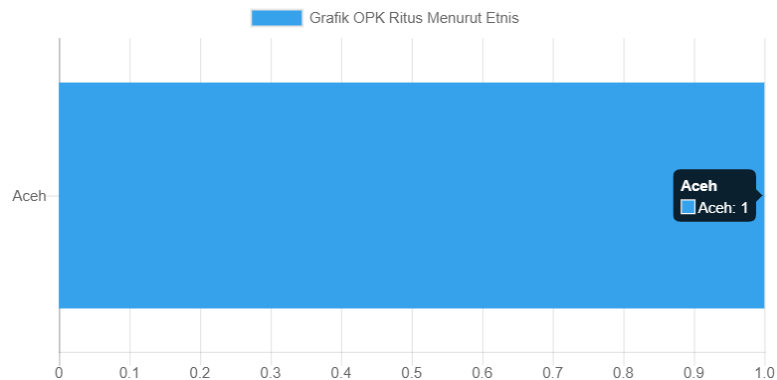
5.4. Ritus

Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat, seperti halnya masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Sebenarnya, masyarakat Aceh Jaya memiliki berbagai banyak perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual, dan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya masih banyak melakukan, sehingga dari aspek SDM ritual sesungguhnya masih cukup tersedia.

Secara umum jumlah ritual di Aceh Jaya yang berhasil diidentifikasi dalam borang dan hasil survei di masyarakat terdapat sekitar 3 jenis. Artinya, secara kelembagaan objek ritus ini masih cukup banyak untuk ditindak lanjuti, Namun dikarenakan waktu pengumpulan data yang begitu singkat maka hal ini tidak maksimal dalam penjelasan secara data.

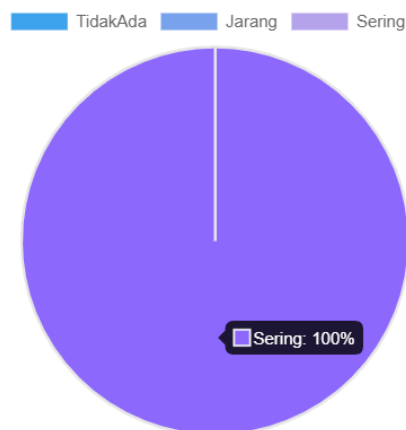
Untuk itu boring ini akan kami perbaiki setelah adanya tindak lanjut dari stakeholder yang ada di Kabupaten Aceh Jaya nantinya.

Grafik 1
Grafik OPK Ritus Menurut Etnis



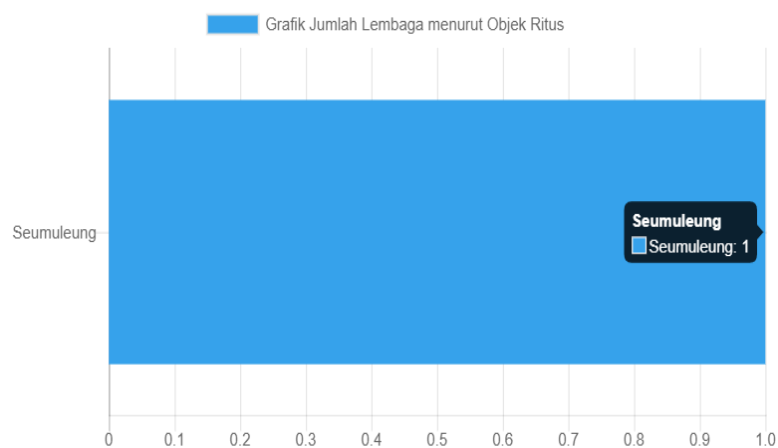
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 2
Diagram OPK Ritus Menurut Frekuensi Pelaksanaan



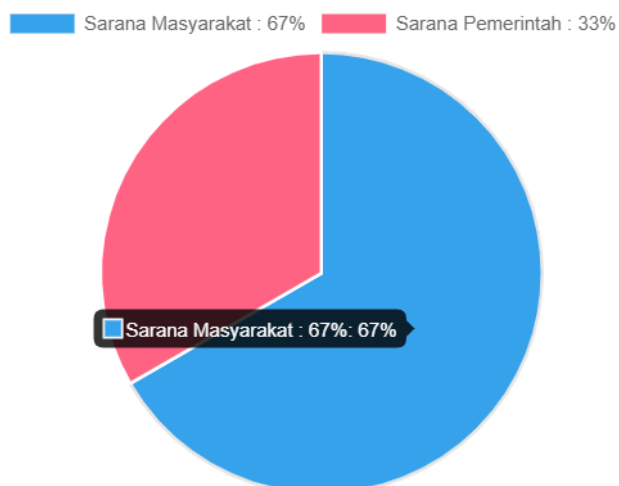
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 3
Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Ritus



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 4
Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Ritus



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

5.5. Pengetahuan Tradisional

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian di atas bahwa pengetahuan tradisional di Kabupaten Aceh Jaya eksistensinya masih tetap terjaga disebabkan karena pengetahuan tersebut masih relevan dari segi fungsi. Diagram dan grafik di bawah ini menunjukkan bahwa 5 jenis pengetahuan tradisional yang jarang dilakukan namun masih tetap dijalankan. Jarangnya dilakukan disebabkan karena bahan baku yang sudah mulai berkurang, tidak relevan untuk beberapa masyarakat, orang yang mengetahui sudah semakin berkurang dan terjadinya perubahan kondisi lingkungan serta sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman, sehingga keberadaannya masih tetap terjaga.

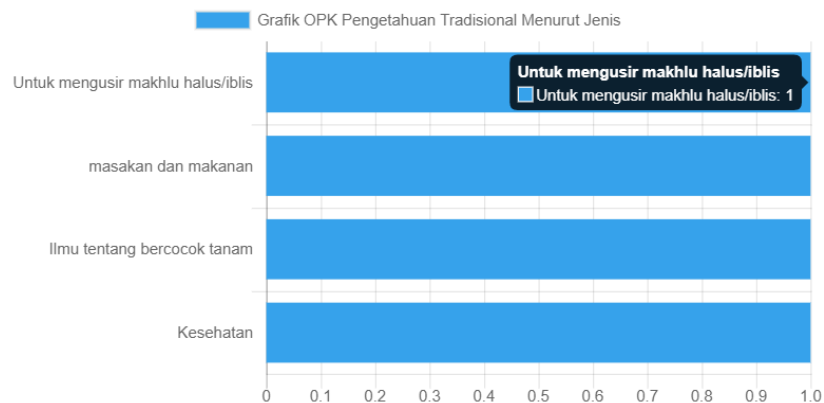
Untuk pelaku pemanfaat pengetahuan tradisional pada berbagai jenis pengetahuan tradisional sejauh ini masih tersebar luas di Kabupaten Aceh Jaya. Aspek yang sangat potensial terutama pada jenis objek makanan (kuliner) tradisional Aceh Kabupaten Aceh Jaya yang saat ini masih sangat eksis dan bahkan menjadi icon Kabupaten Aceh Jaya. Di antaranya, yaitu: makanan tradisional Gulai Pliek Ue, Gulai Jruek Drien, Kuah Keumamah, Kuah Beulangong, Kuah Cue, Kuah Sie Manok bak kala dan boh kulu dan sebagainya.

Demikian pula pada aspek pengetahuan tradisional lainnya, seperti busana tradisional baju adat dan baju upacara perkawinan, upacara adat, sampai saat masih sangat eksis. Hal ini tidak terlepas tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menggiatkan tema pembangunan

berbasis budaya dan adat, baik dalam dimensi ekspresi budaya maupun revitalisasi dan penguatan nilai-nilai budaya dan adat yang di landasi iman dan takwa (religius).

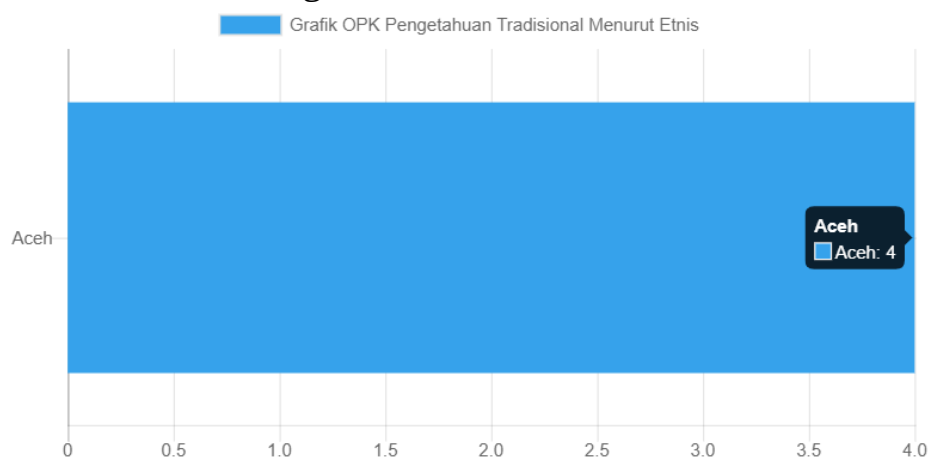
Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pelaku pemanfaatan dan lembaga objek pengetahuan tradisional masih cukup lumayan baik di Kabupaten Aceh Jaya (meskipun terlihat secara teknis tampilan grafik dari dalam APIK masih bermasalah):

Grafik 1
Grafik OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Jenis



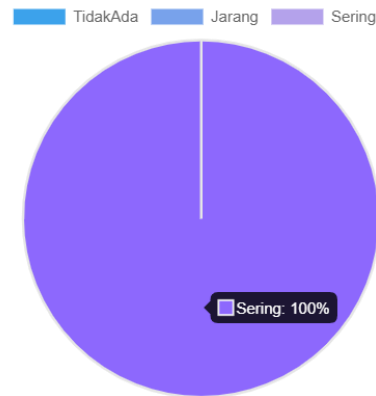
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 2
Grafik OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Etnis



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 3
Diagram OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

5.6. Teknologi Tradisional

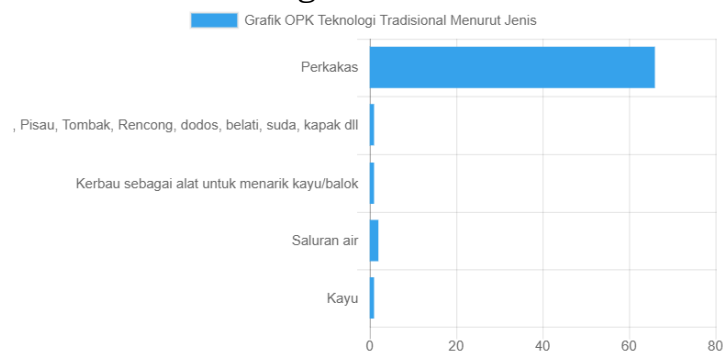
Pelaku pemanfaatan teknologi tradisional oleh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan juga masyarakat pendatang relatif masih tinggi persentasenya, hal ini disebabkan karena dewasa ini beberapa teknologi tradisional masih relevan secara fungsional dalam mendukung daya survive masyarakat, khususnya untuk sektor pertanian dan nelayan. Namun demikian tetap saja teknologi tradisional sulit menghindari terjadinya perubahan. Untuk teknologi produksi pertanian yang sudah tidak ada seperti langai, Nok dan Glem, karena teknologi tersebut selain tidak relevan dengan sistem irigasi dan proses produksi juga tidak mendukung peningkatan capaian volume produksi. Untuk teknologi yang masih bertahan seperti alat membajak seperti Langai, selain ramah lingkungan juga dapat digunakan sebagai alternatif ketika teknologi modern mengalami masalah atau biaya operasionalnya cukup tinggi. Begitu juga dengan teknologi tradisional di sektor kenelayan, mereka masih menggunakan teknologi tradisional sebagai alternatif dan juga sebagai teknologi yang mendukung nuansa rekreatif bagi penikmat dunia kenelayan.

Sementara itu, untuk teknologi arsitektur dan senjata tradisional relatif lebih sulit mengalami perkembangan pemajuan seiring perubahan dinamika sosial masyarakat ke arah masyarakat yang lebih modern. Khusus untuk arsitektur, bentuk rumah Adat Aceh sudah jarang digunakan oleh orang Aceh Jaya sendiri, mereka lebih banyak menggunakan model arsitektur modern dengan bahan baku terbuat dari

batu, semen, dan pasir. Bangunan rumah panggung yang khas Aceh sudah sangat jarang digunakan seperti, Jambo atau balee- balee disamping rumah maereka sebagai tempat bercengkrama keluarga.

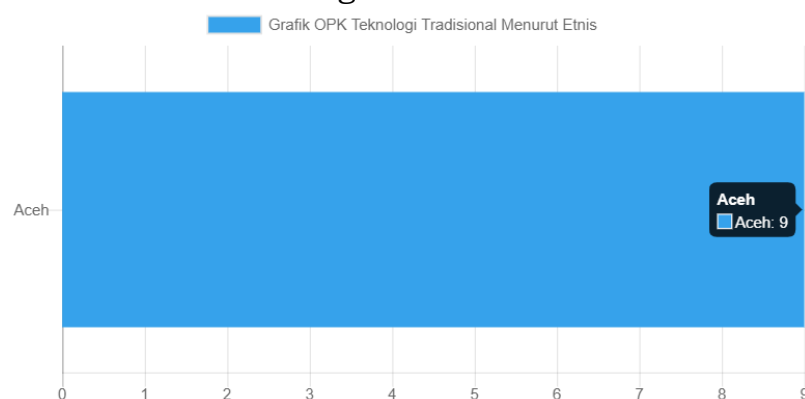
Untuk teknologi tradisional senjata bahkan tidak ada lagi perkembangan. Hal itu disebabkan selain karena fungsi sakral dari senjata yang diperoleh melalui pewarisan, juga karena kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif. Walaupun senjata yang menjadi warisan masih tersimpan rapi di rumah tangga orang Aceh seperti senjata peudeng, rencong, siwah, belati, tumbak/ kapak, suda dan keunareh dan lain- lain, tetapi teknologi tradisional tersebut jarang bahkan ada yang tidak pernah lagi digunakan. Penggunaan teknologi tradisional senjata umumnya pada saat upacara-upacara ritual atau dalam proses pengobatan. Lebih jauh, menurut informasi perhatian generasi sekarang mulai berkurang terhadap senjata tradisional selain karena terbatas jumlahnya, juga karena penggunaan yang diatur oleh undang-undang.

Grafik 1
Grafik OPK Teknologi Tradisional Menurut Jenis



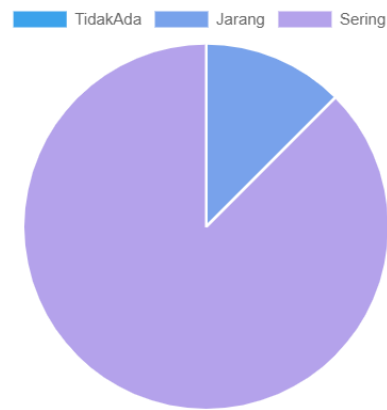
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

Grafik 2
Grafik OPK Teknologi Tradisional Menurut Etnis



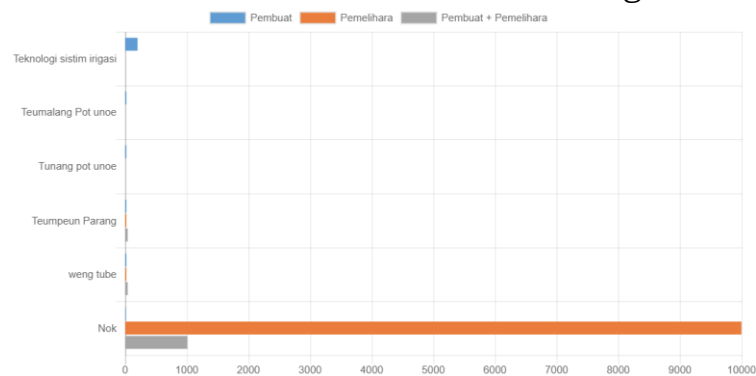
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

Grafik 3
Diagram OPK Teknologi Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



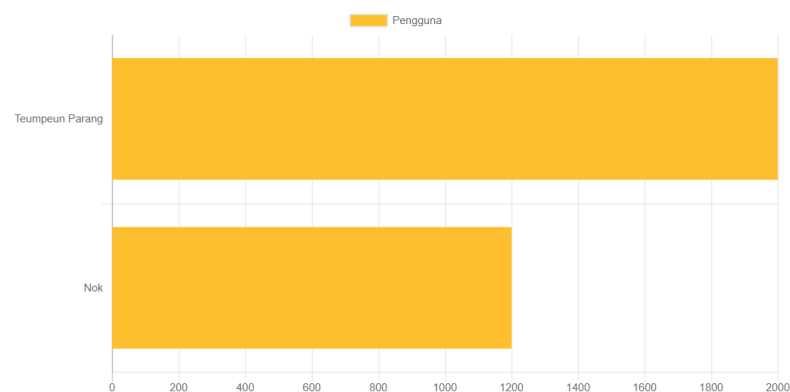
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

Grafik 4
Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Teknologi Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

Grafik 5
Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Tradisional

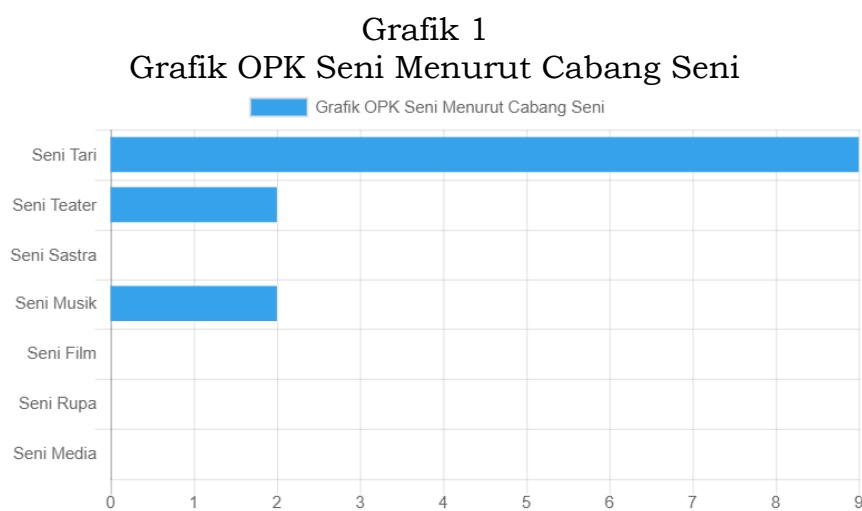


Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

5.7. Seni

Dari keseluruhan OPK yang terdata, objek seni merupakan objek yang paling terbanyak terekam dalam borang dan APIK tahun 2018. Objek seni dalam konteks SDM dan kelembagaan di Kabupaten Aceh Jaya dalam beberapa tahun terakhir ini cukup baik, oleh karena adanya proaktif dan fasilitasi dari Dewan Kesenian Kabupaten Aceh Jaya. Dengan demikian, dari aspek kelembagaan, terdata 13 lembaga total objek seni yang terdata.

Berikut visual grafik jumlah pelaku atau pendukung serta lembaga seni menurut cabang seni:



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

Berdasarkan grafik di atas, tergambar dari masing-masing cabang seni terdiri 14 (seni tari, 9; seni teater 2 ; seni sastra - ; seni musik 2; dan seni film - .

5.8. Bahasa

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan data borang dan APIK, paling tidak ditemukan 2 jenis dialek bahasa Aceh dipergunakan oleh masyarakat asli Kabupaten Aceh Jaya, yaitu: Bahasa Jamee; dan Bahasa Aceh Sendiri yang merupakan pemilik masyarakat Aceh Sendiri

Konteks SDM pengguna bahasa Aceh dari dua dialeg tersebut masih tetap eksis dan digunakan dalam bahasa komunikasi di lingkungan masyarakat suku Aceh di Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan data, bahwa di masing-masing dialek tersebut terdapat masing-masing lembaga, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1
Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Bahasa



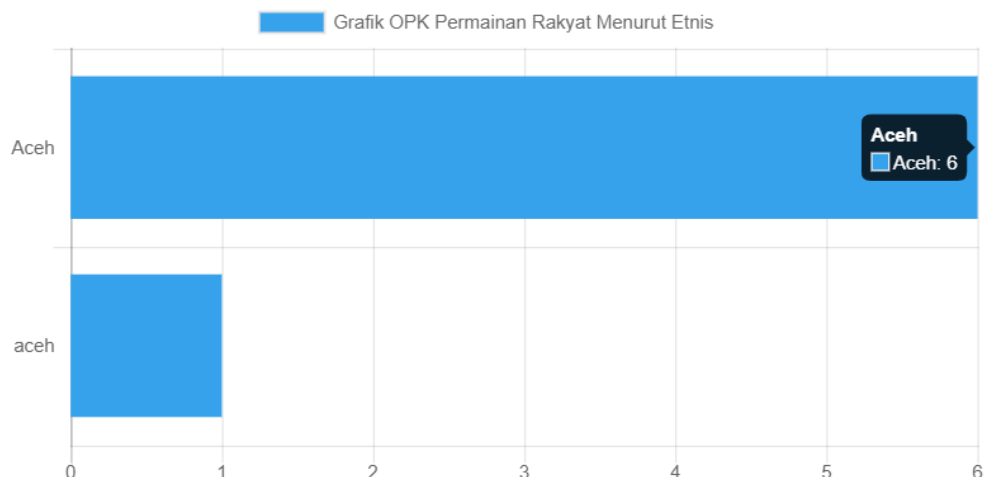
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

5.9. Permainan Rakyat

Berdasarkan persentase di agram 6, digambarkan jenis permainan yang masih sering dimainkan oleh anak-anak atau masyarakat Kabupaten Aceh Jaya sekitar 13% dan yang sudah jarang sekitar 88%. Data ini menunjukkan kalau dari SDM objek permainan rakyat pada prinsipnya cukup tersedia, namun sudah mulai terjadi pergeseran, di mana sudah ada kecenderungan beberapa jenis permainan sudah mengalami kepunahan.

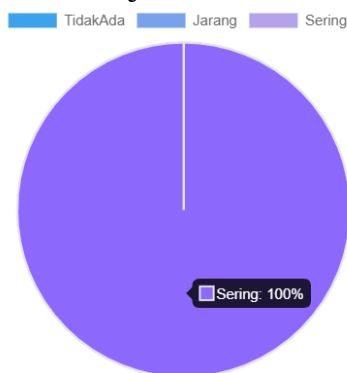
Dari segi kelembagaan, tidak ada data yang pasti untuk kita sajikan. Namum di beberapa event daerah dan provinsi masih sering diperlombakan, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 1
Grafik OPK Permainan Rakyat Menurut Etnis



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

Grafik 2
Diagram OPK Permainan Rakyat Menurut Frekuensi Pelaksanaan

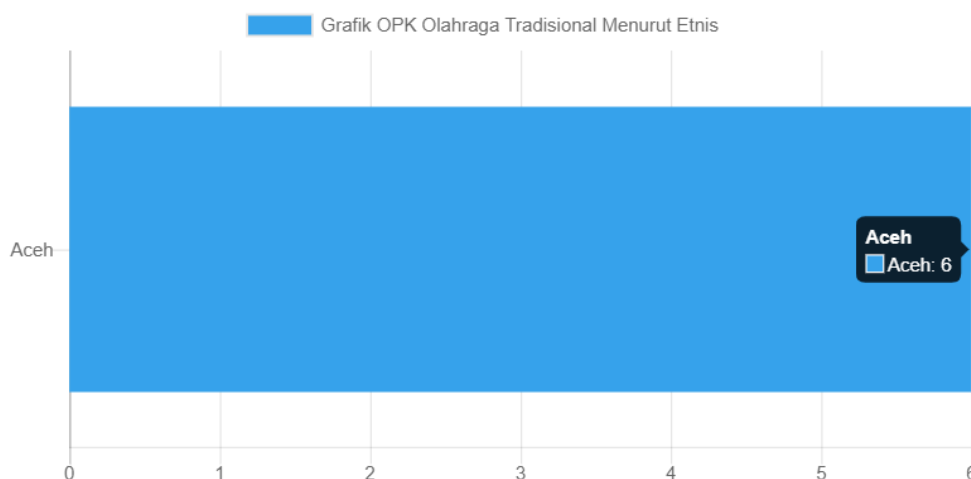


Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018

5.10. Olahraga Tradisional

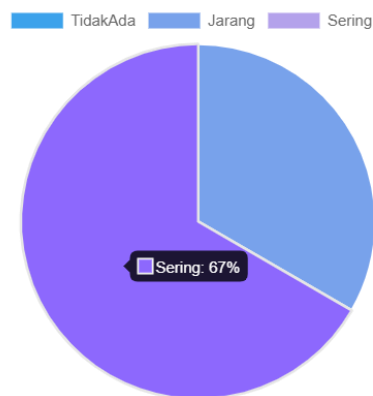
Olahraga Tradisional Memerhatikan grafik dan diagram OPK Olahraga Tradisional, tergambar olahraga tradisional yang hingga saat ini masih banyak yang dipertahankan sekitar yaitu; sekitar 60% dan yang jarang sekitar 40% . Dari 6 jenis objek olahraga tradisional tersebut juga memiliki 13 lembaga yang bersifat informal dalam mempertahankan olahraga tradisional Kabupaten Aceh Jaya, di antaranya Dinas terkait bidang olahraga, dan club-club olah raga yang ada pada masyarakat. Berikut dikemukakan grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Olahraga Tradisional berdasarkan data borang dan APIK 2018, yaitu:

Grafik 1
Statistik OPK Olahraga Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

Grafik 2
Diagram OPK Olahraga Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan

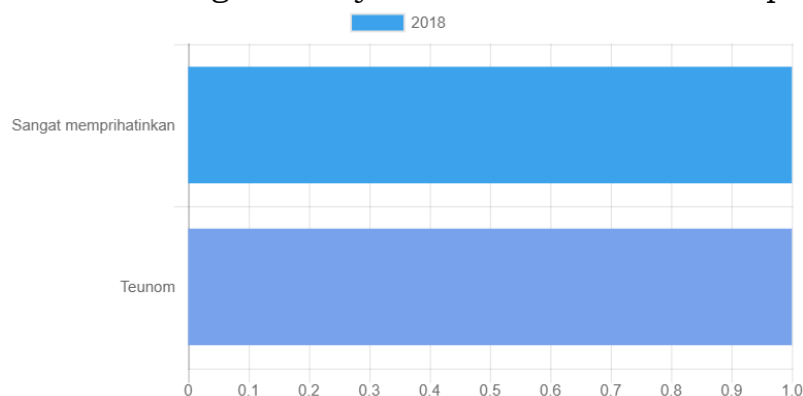


Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

5.11. Cagar Budaya

Eksistensi SDM dan lembaga cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sesungguhnya masih sangat terbatas dan sangat urgen penguatan SDM dan kelembagaan dalam rangka memelihara dan melestarikan cagar budaya yang ada sebagai khazanah kekayaan daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Grafik 1
Grafik OPK Cagar Budaya Menurut Tahun Penetapan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

Grafik 2
Diagram OPK Cagar Budaya Menurut Kondisi Aktual



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya 2018

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Sebagai daerah pesisir Barat Indonesia, Aceh Jaya memiliki ciri khas khusus sama seperti daerah yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari masyarakatnya yang agamais, relegius dan berbudaya. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya saat ini juga terus berusaha maksimal melakukan pelestarian budaya yang ada di daerah ini. Pelestarian budaya dengan menjaga eksistensi sumber daya manusia (SDM), lembaga, dan sarana dan prasarana budaya dan kearifan lokal suatu daerah sangat urgen menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dan pendataan terkait sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Aceh Jaya saat ini masih sangat terbatas, baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun sarana dan prasarana yang disiapkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana yang tersedia masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengakselerasi percepatan pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.

Di Kabupaten Aceh Jaya, Pasca rehab dan rekonstruksi tsunami tahun 2004 silam, sudah mulai menggeliat kembali karena sebagian besar sarana dan prasarana lunuh lantak dihantam ombak besar yang disebut Tsunami, bahkan sebagian pegiat seni dan budaya juga ikut tiada. Sejak tahun 2010, penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah dan NGO luar mulai dilakukan, mulai dari pengadaan ruang dan tempat untuk melakukan pameran, promosi, dan pertunjukkan seluruh objek kebudayaan pada setiap Even Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan pada bulan April dalam setiap tahunnya.

Adapun gambaran umum sarana dan prasarana OPK yang ada di Kabupaten Aceh Jaya saat ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9:
Data Ketersediaan Saprara OPK Kabupaten Aceh Jaya

No.	Nama OPK	Sarana Prasarana	
		Pemerintah	Masyarakat
1.	Manuskrip	Terbatas	Terbatas
2.	Tradisi Lisan	Belum ada data pasti	Sifatnya turun temurun
3.	Adat Istiadat	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti
4.	Ritus	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti
5.	Penget. Tradisional	Belum ada data pasti	Warung kuliner, pusat
6.	Teknol. Tradisional	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti

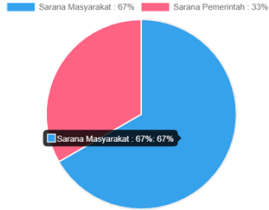
7.	Seni	Gedung Kesenian	Pentas Seni Kecamatan
8.	Bahasa	Buku Adat Lokal	Belum ada data pasti
9.	Permainan Rakyat	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti
10.	Olahraga Tradisi	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti
11.	Cagar Budaya	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti

Sumber: Hasil analisis ketersediaan sapsras OPK Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

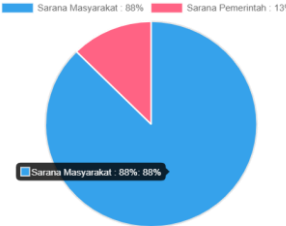
Adapun gambaran persentase sarana dan prasarana setiap OPK yang terekam dalam sistem aplikasi APIK dapat dilihat pada beberapa diagram berikut:

Tabel 1

Tabel Diagram Presentase Sarana Prasarana OPK

Diagram Objek Kebudayaan	Keterangan
OPK Manuskrip  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapsras Pemerintah: 75 % Sapsras Masyarakat: 25 % Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Tradisi Lisan Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapsras Pemerintah: 0% Sapsras Masyarakat: 0% Catatan: Belum tersedia dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan perhatian pemerintah.
OPK Adat Istiadat Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapsras Pemerintah: 0% Sapsras Masyarakat: 0% Catatan: Belum tersedia dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan perhatian pemerintah.
OPK Ritus  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapsras Pemerintah: 33% Sapsras Masyarakat: 67% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan dari pemerintah.

OPK Pengetahuan Tradisional Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapras Pemerintah: 0% Sapras Masyarakat: 0% Catatan Belum tersedia dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan perhatian pemerintah.
OPK Teknologi Tradisional Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapras Pemerintah: 0% Sapras Masyarakat: 0% Catatan Belum tersedia dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan perhatian pemerintah.
OPK Seni Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapras Pemerintah: 43% Sapras Masyarakat: 57% Catatan Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Bahasa Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 218	Sapras Pemerintah: 0% Sapras Masyarakat: 0% Catatan Belum tersedia dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan perhatian pemerintah.

OPK Permainan Rakyat:  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapras Pemerintah: 13% Sapras Masyarakat: 88% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Olahraga Tradisional:  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapras Pemerintah: 0% Sapras Masyarakat: 100% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Cagar Budaya:  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, 2018	Sapras Pemerintah: 100% Sapras Masyarakat: 0% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.

Sumber: Hasil analisis presentase sapras OPK Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Keseluruhan Diagram OPK di atas, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan juga masyarakat sudah mulai berkontribusi mengambil peran dalam menjaga eksistensi seluruh objek kebudayaan.

Sarana prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik di masyarakat ataupun yang diadakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan kebijakan pemeliharaan dari lembaga formal pemerintah, baik pada level eksekutif dan legislatif. Kebijakan ini selain menghindari terjadinya kepunahan terhadap kekayaan budaya daerah, juga menegaskan otentik kepemilikan dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan di atas, sebagian besar memang masih

berasal dari swadaya masyarakat, sejauh ini pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan menyediakan sarana dan prasarana karena terkendala oleh kebijakan dan program yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan aspek lainnya dari pada aspek kebudayaan.

Kondisi terbatasnya sarana dan prasarana yang bersumber dari pemerintah pada diagram-diagram di atas tergambar sangat kecil. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap aspek pemajuan dan pemeliharaan objek kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya. Garfik di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung OPK ini pada umumnya difasilitasi oleh masyarakat dengan kisaran persentase rata-rata hampir berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kurang maksimalnya perhatian terhadap pemeliharaan dan pemajuan teknologi tradisional dikarenakan terbatasnya pendanaan yang dapat diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

VII.1. Manuskrip

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Isi dan substansi naskah masih banyak yang belum diketahui secara komprehensif	Pengumpulan dan dokumentasi naskah	Menggali lebih dalam makna yang terdapat di dalam manuskrip	Naskah manuskrip yang tersimpan di masyarakat	Mengumpulkan dan mendokumentasikan naskah yang masih terdapat di masyarakat	Naskah sudah diterjemahkan dan disusun	Penggalian nilai-nilai historisitas	Penggalian nilai-nilai historisitas	Penggalian nilai-nilai historisitas
2.	Banyak naskah yang sudah tua dan usang dimakan usia	Digitalisasi naskah	Menjaga kelestarian naskah	Naskah mansukip yang tersimpan di masyarakat	Pengadaan alat digital Proses digitalisasi naskah	Naskah konu sudah digitalisasi	Naskah konu sudah digitalisasi	Naskah konu sudah digitalisasi	Naskah konu sudah digitalisasi

VII.2. Tradisi Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Penutur tradisi sudah usia lanjut dan tidak ada upaya regenerasi.	Upaya regenerasi dalam rangka melestarikan tradisi lisan	Melestarikan tradisi lisan	Generasi muda	Melatih penutur tradisi lisan dari kalangan pemuda dan pelajar.	Tersedia SDM penutur tradisi lisan	Geliat tradisi lisan semakin berkembang	Desiminasi tradisi Lisan	Desiminasi tradisilisan secara fill in, kreatif dan inovatif
2.	Pertunjukan tradisi lisan jarang dilakukan, baik di level formal maupun informal.	Pertunjukan budaya tradisi lisan di setiap even budaya	Sosialisasi dan melestarikan budaya tradisi lisan	Pemerintah, lembaga adat, lembaga seni budaya, dan pendidikan	Pertunjukan tradisi di setiap event secara terorganisir dan berkesinambungan.	Terbangun sapras pertunjukan dan membudaya pertunjukan tradisi lisan.	Tradisi lisan semakin eksis dan aktual di masyarakat	Tradisi lisan go Internasional	Tradisi lisan go Internasional

VII.3. Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Adat istiadat telah kehilangan legitimasi nya sehingga posisi adat-istiadat telah diganti oleh hukum positif.	Revitalisasi dan reaktualisasi adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat.	Memperkuat nilai budaya adat istiadat lokal sebagai sistem nilai dalam tata kehidupan.	Lembaga atau Dewan adat	Identifikasi ragam adat istiadat; Sosialisasi dan Penetapan Qanun tentang adat; Pelaksanaan hukum adat Pelaksanaan adat dan hukum adat	Teridentifikasi ragam adat istiadat dan adanya produk hukum tentang adat istiadat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat
2.	Nilai-nilai kepercayaan yang bersumber dari tradisi dan agama mulai luntur dan posisinya	Revitalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan	Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter .	Lembaga keluarga Lembaga pendidikan	Menyusun buku tentang adat istiadat. Mengembangkan program pendidikan terintegrasi nilai-nilai adat	Ada Buku tentang adat istiadat dan kearifan lokal	Tradisi adat hidup dimasyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi	Tradisi adat hidup di masyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi	Tradisi adat hidup dimasyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi

	telah diganti oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan yang sekuler.	nilai religi.			istiadat dan budaya local.				
--	---	---------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--

VII.4. Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku ritus sudah mulai berkurang dan yang konsisten melaksanakan sudah berusia lanjut dan tidak ada upaya regenerasi.	Reaktualisasi dan regenerasi pengetahuan ritus yang masih relevan untuk dikembangkan	Memelihara eksistensi ritual-ritual leluhur	Lembaga keluarga, adat, dan masyarakat	Reaktualisasi dan sosialisasi kepada generasi penerus	Pelaksanaan ritus hiudp kembali di tengah masyarakat.	Pelaksanaan ritus hiudp kembali di tengah masyarakat.	Pelaksanaan ritus hiudp kembali di tengah masyarakat.	Pelaksanaan ritus hiudp kembali di tengah masyarakat.

2.	Nilai-nilai kepercayaan dalam acara ritual sudah memudar seiring perkembangan rasionalitas manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan moder.	Melakukan riset dan penyusunan buku yang mengungkap sisi rasionalitas nilai ritus dalam konteks sosial masyarakat	Mempertemukan sisi rasionalitas ritus dengan nilai kearifan lokal	Pemerintah, tokoh adat, masyarakat, akademisi, dan budayawan serta generasi muda	Melakukan riset dan penyusunan buku; Sosialisasi dan penguatan pemahaman rasional di lembaga pendidikan.	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan
----	--	---	---	--	--	--	--	--	--

VII.5. Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan	Melibatkan lembaga adat dan masyarakat secara luas dalam melestarikan	Lembaga adat dan masyarakat, dan pelaku kuliner dan medis	Identifikasi secara optimal sejumlah jenis ilmu pengetahuan	Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional

	an khazanah pengetahu an tradisiona l.	memelihara pengetahua n tradisional.	an dan mengemba ng-ka n pengetahu an tradisional	tradisional (sando)	tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarika n pengetahua n tradisional;	n pengethu an tradisiona l.	al semakin berkemb ang	tradisio nal semakin berkem bang.	al semakin berkemb ang
3.	Belum ada produk hukum tentang legalitas original jenis pengetahua n tradisional, seperti kuliner, busana lokal Aceh Jaya	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapka n status formal jenis pengetahua n tradisional yang ada di Aceh Jaya	Menjaga orisinalitas sejumlah jenis ilmu pengetahu an tradisional yang ada di Aceh Jaya	Pemerinta h dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis ilmu pengetahuan tradisional. Pembuatan produk hukum pengetahua n tradisional.	Ada aturan hukum formal tentang pengetah uan tradision al.	Ada aturan hukum formal tentang pengetahu an tradisional .	Ada aturan hukum formal tentang pengetah uan tradision al.	Ada aturan hukum formal tentang pengetahu an tradisional .

VII.6. Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis teknologi tradisional semakin sulit.	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan teknologi tradisional yang masih relevan	Pelestarian, beberapa bahan baku jenis teknologi tradisional yang masih relevan	Bahan baku teknologi tradisional.	Menjaga ketersediaan bahan-bahan jenis pengetahuan tradisional yang masih relevan, seperti; kerajinan, arsitektur, dan perkakas pertanian.	Tersedia bahan dan sapras produktivitas teknologi pertanian	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.
2.	Lemahnya Penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah teknologi tradisional	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara teknologi tradisional.	Melibatkan lembaga adat dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan teknologi tradisional	Lembaga adat dan masyarakat, komunitas petani, nelayan, dan arsitek.	Identifikasi secara optimal sejumlah jenis teknologi tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam lestarikan	Tersedia Buku Khazanah teknologi tradisional Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian teknologi	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.

					teknologi tradisional;	tradisional .			
					Pembuatan miniatur rumah-rumah adat berbasis arsitektur yang sekaligus sebagai wadah promosi sejumlah teknologi dan pengetahuan tradisional.	Tersedia ruang dan sapras pameran dan promosi jenis teknologi tradisional .			
3.	Belum ada produk hukum tentang legalitas original jenis teknologi tradisional, seperti kuliner, busana lokal Aceh Jaya	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan status formal jenis teknologi tradisional yang ada di Aceh Jaya	Menjaga orisinalitas sejumlah jenis teknologi tradisional yang ada di Aceh Jaya	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis teknologi tradisional. Pembuatan produk hukum	Ada aturan hukum formal tentang teknologi tradisional.			

					pengetahuan tradisional.				
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

VII.7. Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Perlengkapan alat-alat kesenian tradisional dan modern sangat terbatas sehingga terkadang menggunakan peralatan sewa.	Pengadaan alat-alat kesenian tradisional dan modern yang representatif untuk pengembangan kesenian Aceh Jaya	Memaksimalkan ekspresi dan produktivitas serta kualitas kesenian Aceh Jaya	Sanggar atau dewan kesenian setiap cabang seni daerah	Mengidentifikasi alat-alat kesenian yang dibutuhkan; Pengadaan alat-alat kesenian yang dibutuhkan	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.
2.	Pemahaman dan pengetahuan serta skill generasi muda dalam bidang seni tradisional	Pendidikan dan pelatihan seni bagi generasi muda Kabupaten Aceh Jaya	Membina dan mengembangkan bakat dan potensi seni generasi muda	Generasi muda, pelajar, dan komunitas seni	Mengaktifkan pelaku seni dalam pembinaan dan pelatihan seni; Penguatan pembelajaran moluk di sekolah	Pelaku seni budaya semakin meningkat dan berkembang; Kurikulum Mulok	Produktivitas seni lokal secara kreatif semakin berkembang	Seni budaya lokal Aceh Jaya mengglobal dan pambangunan Perguruan Tinggi Kesenian	Terbangun Perguruan Tinggi Kesenian

	semakin berkurang				terkait seni lokal; Mendirikan sekolah kesenian.	di sekolah dan ada sekolah kesenian		an Tinggi seni	
3.	Belum ada gedung pustaka naskah sastra dalam pengembangan seni sastra	Pembangunan perpustakaan dan pusat literasi sastra lokal	Pengembangan pustaka kesusastraan daerah	Pemkot, dinas arsip dan perpustakaan; lembaga pendidikan; dan pegiat sastra	Mendirikan pojok baca dan perpustakaan sastra Penguatan literasi di bidang sastra daerah	Terdapat pojok baca atau perpustakaan sastra daerah	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang.	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang.	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang.
4.	Belum ada fasilitas dan rumah produksi yang representatif dalam memproduksi seni dan film	Membangun rumah produksi seni film lokal dan nasional di Aceh Jaya	Mengembangkan kreativitas dan produktivitas pelaku seni film daerah	Pelaku seni film	Membangun rumah produksi; Melatih skill generasi muda di bidang produksi film Produksi film seni dan dokumenter daerah, dan film lainnya.	Rumah produksi film terbangun secara representatif	Kuantitas dan kualitas pelaku seni film semakin baik dan produktif.	Geliat seni film semakin maju dan nasional dan internasional.	Geliat seni film semakin maju dan nasional dan internasional.

5.	Lembaga/komunitas seni belum optimal dalam pelestarian dan pengembangan kesenian daerah.	Lembaga/Komunitas seni melakukan pelestarian dan pengembangan kesenian secara optimal	Pelestarian dan pengembangan kesenian daerah	Lembaga/Sanggar seni dan lembaga pendidikan	Pembentukan kelompok pembinaan cabang seni Pembinaan secara informal dan formal terkait kesenian daerah Penguatan seni di lembaga pendidikan sebagai pelajaran mulok	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin meningkat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di lembaga pendidikan.	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin meningkat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di lembaga pendidikan.	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin meningkat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di lembaga pendidikan.	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin meningkat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di lembaga pendidikan.
----	--	---	--	---	--	--	--	--	--

VII.8. Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Penutur bahasa Aceh sebagai bahasa penduduk asli Aceh Jaya semakin berkurang.	Peningkatan kualitas dan kuantitas penutur bahasa daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas penutur bahasa daerah	Lembaga/Pustaka bahasa; lembaga adat; dan lembaga pendidikan.	Melakukan diklat dan pengembangan bahasa daerah; Menyusun kamus bahasa daerah secara lengkap dari seluruh dialek Aceh di Aceh Jaya	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.
2.	Di dalam keluarga telah mulai jarang menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa ibu akibat trend modernisasi.	Penguatan penggunaan bahasa daerah di dalam lingkungan keluarga.	Pelestarian penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan keluarga	Keluarga suku Aceh di Aceh Jaya	Sosialisasi pentingnya mempertahankan bahasa ibu (daerah) dalam lingkungan keluarga sebagai upaya pelestarian bahasa	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga di Aceh Jaya	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga di Aceh Jaya	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga di Aceh Jaya	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga di Aceh Jaya

					daerah.				
3.	Adanya rasa malu dalam diri generasi muda untuk menggunakan bahasa daerahnya.	Penggunaan bahasa daerah di dalam lingkungan informal dan sosial masyarakat.	Membangun rasa bangga terhadap bahasa daerah sendiri	Masyarakat dan generasi muda	Sosialisasi dan pembudayaan Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi dan masyarakat.	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi dan masyarakat.	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi dan masyarakat.	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi dan masyarakat.

VII.9. Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku dan pemeran permainan tradisional semakin ditinggalkan oleh generasi	Reaktualisasi permainan rakyat melalui penguatan moluk di	Untuk melestarikan permainan rakyat	Lembaga pendidikan	Menyusun buku inventarisasi tentang jenis permainan rakyat;	Buku tentang permainan tradisional tersedia dan dijadikan sebagai	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.

	muda akibat modernisasi budaya	lembaga pendidikan			Membuat buku panduan pembelajaran Mulok permainan tradisional di lembaga pendidikan.	kurikulum Mulok di sekolah.		.	
2.	Jarang dilakukan even pertandingan dan pagelaran permainan rakyat	Menggeliatkan even dan festival permainan rakyat	Melestarikan dan menjadikan permainan rakyat.	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan .	Melakukan sosialisasi dan pembinaan permainan tradisional; Melakukan even dan festival permainan dalam setiap moment yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat dan generasi muda.	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Aceh Jaya	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Aceh Jaya	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Aceh Jaya	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Aceh Jaya

VII.10. Olahraga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Pelaku dan pemain olahraga tradisional semakin berkurang di masyarakat akibat perkembangan olahraga modern	Reaktualisasi olahraga tradisional melalui penguatan moluk di lembaga pendidikan	Untuk melestarikan olahraga tradisional	Lembaga pendidikan	Menyusun buku inventarisasi tentang jenis olahraga tradisional; Membuat buku panduan pembelajaran Mulok olahraga tradisional di lembaga pendidikan.	Buku tentang olahraga tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di sekolah.	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang

2	Jarang dilakukan even pertandingan olahraga tradisional	Menggeliatkan even dan pertandingan olahraga tradisional	Melestarikan dan menjadikan olahraga tradisional.	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan olahraga tradisional; Melakukan even dan pertandingan olahraga tradisional dalam setiap moment yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat dan generasi muda	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Jaya	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Jaya	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Jaya	Terlaksana Pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Aceh Jaya
---	---	--	---	--	--	---	---	---	---

VII.11. Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Pemeliharaan situs cagar budaya belum	Peningkatan pemeliharaan cagar budaya	Pelestarian	Cagar budaya dalam Kabupaten Aceh	Pendataan secara riil dan pemeliharaan objek	Terdata dan tertata secara baik cagar budaya	Terdata dan tertata secara baik	Terdata dan tertata secara baik	Terdata dan tertata secara baik

	optimal dilakukan			Jaya	cagar budaya Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Aceh Jaya	cagar budaya Kabupate n Aceh Jaya	cagar budaya Kabupat en Aceh Jaya	cagar budaya Kabupat en Aceh Jaya
--	----------------------	--	--	------	---	------------------------	---	---	---

VII.A. UPAYA YANG DITEMPUH

Kebudayaan, baik budaya lokal maupun nasional adalah kebudayaan kita bersama yakni kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu, wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan tersebut, menjadi kewajiban bersama antara seluruh komponen masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat dan pemerintah harus tegas dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara revitalisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, fill-in, kreasi dan inovasi, serta membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi budaya bangsa.

Beberapa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu;

- (1) Revitalisasasi (dihidupkan lagi dan didorong agar tumbuh dan berkembang);
- (2) Reaktualisasi (dihidupkan kembali);
- (3) Revisi (disesuaikan dari tujuan semula;
- (4) Restrukturisasi (dimodifikasi agar sesuai dengan zamannya);
- (5) Fill In (diisi dengan nilai-nilai baru);
- (6) Inovasi (adanya kreativitas budayawan agar lebih menarik);
- (7) Kreasi (membuat kreasi baru yang sesuai dengan daerahnya); dan,
- (8) Delete (adanya penghapusan nilai-nilai yang tidak sesuai).

Dalam konteks upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Jaya saat ini ditemukan beberapa upaya sebagai berikut:

No.	Upaya yang Dilakukan	Objek Kebudayaan
1.	Upaya revitalisasi dan reaktualisasi seluruh konteks objek kebudayaan melalui pengidentifikasian seluruh OPK di Kabupaten Aceh Jaya.	Seluruh Objek kebudayaan
2.	Upaya penguatan lembaga keadatan di Kabupaten Aceh Jaya sesuai semangat visi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.	Adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan, dan

		bahasa, dsb.
3.	Penguatan peran kelembagaan adat dan Dewan Kesenian Aceh Jaya dalam pemajuan kebudayaan.	Seluruh Objek Kebudayaan
4.	Upaya pelestarian dan promosi budaya lokal melalui even Festival Aceh Jaya Gemilang serta even lainnya di setiap tahun di mana dengan melakukan pameran, pertunjukan, pagelaran, dan promosi budaya lokal, seperti: kesenian, ritual, adat, permainan, olahraga, dan kuliner lokal.	Seluruh Objek Kebudayaan
5.	Penyusunan Kamus bahasa, dan karya seni sastra lokal dengan penguatan literasi kebudayaan di beberapa komunitas seni budaya Kabupaten Aceh Jaya.	Seni, Bahasa, dan Sastra.
6.	Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembentukan karakter melalui lembaga pendidikan.	Busana, adat-istiadat, tradisi, seni, pengetahuan, teknologi, permainan dan olahraga tradisional.
7.	Pelaksanaan program dan kebijakan yang berbasis kebudayaan; seperti Kaili Day (instansi pemerintah dan seluruh peserta didik memakai baju adat daerah)	Pengetahuan (Busana tradisional)

VII. B. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

1. Permasalahan Umum

Berdasarkan hasil survei, diskusi terbuka, dan pengkajian terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Jaya, ditemukan beberapa permasalahan secara umum, yaitu:

1. Belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Jaya;
2. Sumber daya manusia (penutur, pembuat, pelaku, pemelihara), dan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah semakin berkurang, punah, dan terdisrupsi oleh kemajuan teknologi dan modernitas;
3. Pelestarian dan revitalisasi beberapa adat dan ritual tradisional daerah mendapat tantangan dari perspektif religiusitas sosial, yang dianggap menghidupkan kembali kepercayaan animisme dan dinamisme;
4. Ketersediaan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani) semakin langka dan lebih mahal.
5. Kelengkapan pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistematis dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
6. Masih banyak jenis objek budaya lokal yang belum memiliki produk hukum yang menetapkan sebagai kekayaan asli (origin) budaya lokal Kabupaten Aceh Jaya.

2. Rekomendasi Umum:

Berdasarkan keenam permasalahan yang ditemukan di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut penyusunan PPKD ini, maka dipandang perlu membentuk tim identifikasi, dokumentasi, dan validasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Jaya yang belum sempat terdata;
2. Penguatan tenaga SDM setiap OPK melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan, baik secara formal maupun informal, serta

penyediaan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah;

3. Dibentuk Tim peneliti dan pengkajian untuk mempertemukan sisi positif dari nilai- nilai budaya dan kearifan lokal dengan konteks ajaran agama, dan atau dalam kerangka melakukan restrukturisasi secara fill-in budaya lokal dengan nilai ajaran agama;
4. Menyediakan dan mengembangkan lahan untuk pengembangan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani);
5. Menyusun buku pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara tersistemik dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum mulok (muatan local) seni budaya daerah, kurikulum mulok seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai- nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan produk hukum berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.
7. Mendorong kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dalam pemajuan kebudayaan daerah.



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 430/ **377** / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan;
 - b. bahwa pengurus utama kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan dimana pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia-manusia Indonesia yang berjiwa diri dan berkarakter;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung Pemajuan Kebudayaan Bangsa, dan untuk kelestarian Kebudayaan pada Kabupaten Aceh Jaya khususnya, diperlukan pendataan secara akurat dan lengkap dengan menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

SP

3

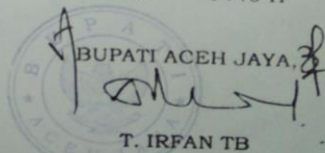
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kebudayaan Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut "TIM PENYUSUN PPKD ACEH JAYA" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi dan SKPK dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menetapkan rencana kerja, pengumpulan data dan rencana rapat penyusunan;
 - c. menyusun Pokok Pikiran mengenai budaya daerah Kabupaten Aceh Jaya;
 - d. merumuskan dan membahas Pokok Pikiran mengenai kebudayaan yang telah disusun;
 - e. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Jaya;
- KETIGA : Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Jaya melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran proses penyusunan PPKD dimaksud perlu disiapkan sekretariat yang bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal Oktober 2018 M
Safar 1440 H


BUPATI ACEH JAYA.
T. IRFAN TB

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
7. Kadis Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
8. Ketua MPD Kabupaten Aceh Jaya di Calang; dan
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA

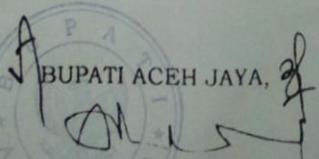
NOMOR : 430/ **311** / 2018

TANGGAL : **15** OKTOBER 2018 M

6 SAFAR 1440 H

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. H.T.Irfan TB	Bupati Aceh Jaya	Pembina
2	Tgk. Yusri. S	Wakil Bupati Aceh Jaya	Pembina
3	Mustafa, S.Pd.M.A.P	Sekretaris Kabupaten Aceh Jaya	Pengarah
4	Ichwan, S.Sos	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Kabupaten Aceh Jaya	Pengarah
5	Drs. Ismail Ibrahim	Ketua MPD Aceh Jaya	Pengarah
6	Abdul Jabar, S.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Aceh Jaya	Ketua
7	Edwar, S.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Jaya	Wakil Ketua I
8	Saloma, SH. M.Si	Kabag Hukum Sekdakab	Wakil Ketua II
9	Safrizal, S.Pd	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh Jaya	Wakil Ketua III
10	Amirahim, S.Pd.I	Kabid Kebudayaan	Sekretaris I
11	Suhandi, S.Pd	Kasi Cagar Budaya dan Permesiuman	Sekretaris II
12	Rahmad, S.Pd.I	Kasi Sejarah, Tradisi dan Kesenian	Anggota
13	Julianto, ST	Kasi Tenaga Kebudayaan	Anggota
14	Drs. H. Anwar Ibrahim	Ketua MAA Kabupaten Aceh Jaya	Anggota
15	T. Khairullah, SE.MM	Ketua DKA Kabupaten Aceh Jaya	Anggota
16	Reza Gunaivi	Anggota DKA Kabupaten Aceh Jaya	Anggota
17	Renny Syafriani S.Pd	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
18	Safrizal, S.Pd	Penggiat Budaya	Anggota
19	Nuraimah, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
20	Irfandi	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
21	Sulestri	Staf Dinas Pendidikan	Anggota


BUPATI ACEH JAYA,
T. IRFAN TB



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Batee Lhee No. Desa Keutapang Telepon / Faximile (0654) 2210068
CALANG

Kode Pos 23654

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 430/SI.C/2018

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini, menunjuk :

No	Nama	NIP	Jabatan	Surel (Email) *
1.	Amirahim, S.Pd.I	197902072006041004	Kabid Kebudayaan	budayaajay18@gmail.com
2.	Rahmad, S.Pd.I	198601132011031001	Kasi Sejarah	
3.	Suhandi, S.Pd	198303092009041005	Kasi Cagar Budaya	
4.	Julianto, ST	198210012011031001	Kasi Tenaga Budaya	
5.	Renny Syafriani, S.Pd	198002042006042006	Staff Kebudayaan	
6.	Irfandi	197402172013071001	Staff Kebudayaan	
7.	Nurraimah, S.Pd	198407062009042006	Staff Kebudayaan	
8.	Sulestri		Staff Kebudayaan	

**) adalah surel (email) aktif yang didaftarkan dalam Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan*

Untuk diverifikasi pada Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK) dalam rangka kegiatan penyusunan Pokok Pikiran Daerah Kabupaten/Kota tahun 2018.

Demikian surat ini disampaikan.

Dikeluarkan : Calang
Pada tanggal : 20 Agustus 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Jaya

